

**PENGARUH PERAN KOMUNIKASI KEPALA DESA TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA JATILAWANG KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN TEGAL**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat dalam rangka penyelesaian Study Strata 1 (S1) untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Komunikasi di Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**Oleh :**

**HELMI AZMI BAHTIAR**

**2220600013**

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**TAHUN 2024**

# LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI



**PENGARUH PERAN KOMUNIKASI KEPALA DESA TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA JATILAWANG KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN TEGAL**

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan Studi Strata 1 (S1) untuk mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Komunikasi di Program Studi Ilmu Komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal

Tegal, Agustus 2024

Telah disetujui oleh

# LEMBAR PENGESAHAN

**PENGARUH PERAN KOMUNIKASI KEPALA DESA TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA JATILAWANG KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN TEGAL**

Telah dipertahankan dalam sidang terbuka skripsi Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal

Hari : Rabu

Tanggal : 12 Agustus 2024

**Ketua Dewan Penguji : Drs. Sana Prabowo, M.Si. ( )**

**NIP. 195612251983121001**

**Sekretaris Dewan Penguji : Dra. Hj. Oemi Hartati, M.Si. ( )**

**NIPY. 4251421959**

**Anggota Dewan Penguji : Dra. Erny Rosyanti, M.Si. ( )**

**NIPY. 3852391959**

# PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HELMI AZMI BAHTIAR

NPM : 2220600013

Jenjang : Strata Satu (S1)

Menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul “**PENGARUH** **PERAN KOMUNIKASI KEPALA DESA TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA JATILAWANG KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN TEGAL**” adalah benar-benar hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Apabila di kemudian hari ditemukan plagiat atau meniru hasil penelitian orang lain yang tingkat kemiripannya 90% dan muncul permasalahan terkait penelitian yang telah dilakukan saya, maka saya bertanggungjawab terhadap keseluruhan SKRIPSI ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh kesadaran.

Tegal, Agustus 2024

Pembuat pernyataan,

Helmi Azmi Bahtiar

# MOTTO

“Bersyukur apa yang sudah kita punya dan berjuanglah, berjuang untuk apa yang belum tercapai”

(Helmi Bahtiar)

“Saya percaya cuma perlu satu buku untuk jatuh cinta pada membaca. Tapi ini bukan tentang buku. Maka cari buku itu, mari jatuh cinta”

(Mata Najwa)

“Jadilah dirimu sendiri, pribadi orang lain sudah ada yang miliki.”

(Oscar Wilde)

# PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur yang mendalam atas keberhasilan peneliti menyelesaikan skripsi ini, peneliti mempersembahkannya kepada:

1. Allah SWT yang selalu memberikan kemudahan dan kesehatan kepada peneliti selama mengerjakan skripsi ini.
2. Orang tua tercinta, yang tidak henti-hentinya memberikan cinta dan kasih sayangnya kepada peneliti sehingga peneliti selalu bersemangat dalam menyelesaikan pendidikan agar dapat menghantarkan peneliti meraih cita- cita serta membahagiakan orang tua tercinta.
3. Seluruh keluarga Helmi Azmi Bahtiar.
4. Helmi Azmi Bahtiar (diri sendiri), terimakasih sudah kuat menghadapi rintangan yang telah dilewati dan tidak menyerah.

# KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT penulis panjatkan, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**PENGARUH** **PERAN KOMUNIKASI KEPALA DESA TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA JATILAWANG KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN TEGAL**”.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tak lupit dari kesalahan dan kekurangan, namun berkat bimbingan, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak skripsi ini mampu penulis selesaikan, maka dari itu pada kesempatn ini penulisan sampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Taufiqulloh, M.Hum., selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal;
2. Bapak Unggul Sugi Harto, S.IP. M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal;
3. Bapak Sarwo Edy, M.I.Kom., selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal;
4. Bapak Diryo Suparto, S.Sos., M.Si., selaku dosen pembimbing I yang selalu memberikan kritikan, arahan dan solusi pada penyelesaian skripsi ini;
5. Bapak Sarwo Edy, M.I.Kom., selaku dosen pembimbing II yang selalu memberikan masukan, arahan dan solusi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Bapak Ibu dosen dan staff serta karyawan Fakultas Ilmu Sosisal dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian skripsi dan memberikan ilmu dengan sabar selama studi.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan karena keterbatasan kemampuan penulis. Untuk itu, sebelumnya penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Penulis juga mengharapkan kritik saran dari semua pihak demi perbaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan, khususnya mahasiswa Program Studi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal.

Tegal, Agustus 2024

Penulis

# ABSTRAK

Nama : Helmi Azmi Bahtiar. NPM: 2220600013. Judul: “Pengaruh Peran Komunikasi Kepala Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal”.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

Kurangnya pendekatan dan komunikasi Kepala Desa pada masyarakat yang belum mengerti apa itu pemberdayaan, kurangnya pembinaan pada pemuda-pemudi untuk menguatkan pembangunan fisik dan mental. Untuk dapat membantu peningkatan progam-program yang ada di Desa Jatilawang seperti Karang Taruna yang masih kurang anggota, sementara jumlah pemuda yang ada sangat banyak.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh peran komunikasi Kepala Desa terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif asosiatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan observasi, kuesioner, dan dokumen pendukung. Populasi penelitian ini adalah seluruh masyarakat Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal dengan jumlah sampel 100 responden. Data dianalisis menggunakan uji regresi linier sederhana.

Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat pengaruh peran komunikasi Kepala Desa terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal.

Kata Kunci : peran komunikasi, kepala desa, pemberdayaan masyarakat

# *ABSTRACT*

Name: Helmi Azmi Bahtiar. NPM: 2220600013. Title: "The Influence of the Village Head's Communication Role on Community Empowerment in Jatilawang Village, Kramat District, Tegal Regency".

The main problems in this study are:

Lack of approach and communication from the Village Head to the community who do not understand what empowerment is, lack of guidance for young men and women to strengthen physical and mental development. To be able to help improve existing programs in Jatilawang Village such as Karang Taruna which still lacks members, while the number of young people is very large.

The purpose of this study was to determine whether or not there was an influence of the Village Head's communication role on community empowerment in Jatilawang Village, Kramat District, Tegal Regency.

This study uses an associative quantitative method. The data collection techniques used were observation, questionnaires, and supporting documents. The population of this study was the entire community of Jatilawang Village, Kramat District, Tegal Regency with a sample size of 100 respondents. Data were analyzed using a simple linear regression test. The results of the study indicate that there is an influence of the role of communication of the Village Head on community empowerment in Jatilawang Village, Kramat District, Tegal Regency.

Keywords: role of communication, village head, communityempowerment

# **DAFTAR ISI**

[LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI ii](#_Toc175343083)

[LEMBAR PENGESAHAN iii](#_Toc175343084)

[PERNYATAAN KEASLIAN iv](#_Toc175343085)

[MOTTO v](#_Toc175343086)

[PERSEMBAHAN vi](#_Toc175343087)

[KATA PENGANTAR vii](#_Toc175343088)

[ABSTRAK ix](#_Toc175343089)

[*ABSTRACT* x](#_Toc175343090)

[DAFTAR ISI xi](#_Toc175343091)

[DAFTAR TABEL xiii](#_Toc175343092)

[DAFTAR GAMBAR xviii](#_Toc175343093)

[DAFTAR LAMPIRAN xix](#_Toc175343094)

[BAB I PENDAHULUAN 1](#_Toc175343095)

[I.1. Latar Belakang 1](#_Toc175343097)

[I.2. Rumusan Masalah 10](#_Toc175343098)

[I.3. Tujuan Penelitian 10](#_Toc175343099)

[I.4. Manfaat Penelitian 10](#_Toc175343100)

[BAB II TINJAUAN PUSTAKA 12](#_Toc175343101)

[II.1. Penelitian Terdahulu 12](#_Toc175343103)

[II.2. Kerangka Teori 14](#_Toc175343104)

[II.3. Kerangka Pemikiran 44](#_Toc175343105)

[II.4. Definisi Konsepsional dan Definisi Operasional 45](#_Toc175343106)

[II.5. Hipotesis 48](#_Toc175343107)

[BAB III METODE PENELITIAN 49](#_Toc175343108)

[III.1. Jenis dan Tipe Penelitian 49](#_Toc175343110)

[III.2. Jenis dan Sumber Data 51](#_Toc175343111)

[III.3. Teknik Pengumpulan Data 53](#_Toc175343112)

[III.4. Teknik Analisis Data 55](#_Toc175343113)

[III.5. Sistematika Penulisan 64](#_Toc175343114)

[BAB IV DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN 67](#_Toc175343115)

[IV.1. Sejarah Desa 67](#_Toc175343117)

[1V.2. Visi dan Misi 68](#_Toc175343118)

[1V.3. Geografis, Peta, dan Batas Desa 73](#_Toc175343119)

[IV.4. Struktur Organisasi Pemerintah Desa 76](#_Toc175343120)

[IV.5. Demografi Penduduk 77](#_Toc175343121)

[IV.6. Lembaga Kemasyarakatan 80](#_Toc175343122)

[IV.7. Sarana dan Prasarana 81](#_Toc175343123)

[IV.8. Potensi Desa 85](#_Toc175343124)

[IV.9. Kondisi Terkini 88](#_Toc175343125)

[BAB V HASIL PENELITIAN DAN UJI HIPOTESIS 89](#_Toc175343126)

[V.1. Karakteristik Responden 89](#_Toc175343128)

[V.2. Transformasi Data Ordinal Menjadi Interval (MSI) 90](#_Toc175343129)

[V.3. Analisis Jawaban Responden 91](#_Toc175343130)

[V.4. Pengujian Instrumen Penelitian 123](#_Toc175343131)

[V.5. Uji Asumsi Klasik 127](#_Toc175343132)

[V.6. Analisis Regresi Linier Sederhana 135](#_Toc175343133)

[V.7. Uji Hipotesis 136](#_Toc175343134)

[V.8. Analisis Koefisien Determinasi 137](#_Toc175343135)

[BAB VI PEMBAHASAN 139](#_Toc175343136)

[BAB VII PENUTUP 152](#_Toc175343138)

[VII.1. Kesimpulan 152](#_Toc175343140)

[VII.2. Saran 152](#_Toc175343141)

[DAFTAR PUSTAKA 154](#_Toc175343142)

LAMPIRAN

# DAFTAR TABEL

[Tabel 1. Data Pekerjaan Penduduk Desa Jatilawang 8](#_Toc174024391)

[Tabel 2. Penelitian Terdahulu 13](#_Toc174024392)

[Tabel 3. Definisi Operasional Penelitian 47](#_Toc174024393)

[Tabel 4. Skala Pengukuran Likert 55](#_Toc174024394)

[Tabel 5. Jumlah Pendduk Berdasarkan Jenis Kelamin 77](#_Toc174024395)

[Tabel 6. Jumlah Pendduk Berdasarkan Kelompok Usia 78](#_Toc174024396)

[Tabel 7. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan 79](#_Toc174024397)

[Tabel 8. Jumlah Pendduk Berdasarkan Pendidikan 80](#_Toc174024398)

[Tabel 9. Lembaga Kemasyarakatan 81](#_Toc174024399)

[Tabel 10. Sarana dan Prasarana Pendidikan 82](#_Toc174024400)

[Tabel 11. Lembaga Ekonomi dan Unit Usaha Desa 83](#_Toc174024401)

[Tabel 12. Industri Kecil dan Menengah 83](#_Toc174024402)

[Tabel 13. Prasarana Kesehatan 84](#_Toc174024403)

[Tabel 14. Tenaga Kesehatan 84](#_Toc174024404)

[Tabel 15. Sarana dan Prasarana Peribadatan 84](#_Toc174024405)

[Tabel 16. Sarana dan Prasarana Olahraga 85](#_Toc174024406)

[Tabel 17. Jenis Kelamin Responden 89](#_Toc174024407)

[Tabel 18. Umur Responden 89](#_Toc174024408)

[Tabel 19. Pendidikan Responden 90](#_Toc174024409)

[Tabel 20. Distribusi Frekuensi Pernyataan “Tidak semua pesan /informasi dari Kepala Desa dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat karena kesibukan Kepala Desa” 91](#_Toc174024410)

[Tabel 21. Distribusi Frekuensi Pernyataan “Kepala Desa kurang respon dalam mengatasi masalah tuntutan atau keluhan masyarakat,” 92](#_Toc174024411)

[Tabel 22. Distribusi Frekuensi Pernyataan “Kepala Desa ikut terjun langsung dalam menangani masalah yang dihadapi masyarakat untuk menarik simpati masyarakat dalam melakukan perubahan” 93](#_Toc174024412)

[Tabel 23. Distribusi Frekuensi Pernyataan “Kepala Desa mempertemukan antara masyarakat dengan pejabat yang berwenang dalam memecahkan masalah pembangunan desa” 94](#_Toc174024413)

[Tabel 24. Distribusi Frekuensi Pernyataan “Pesan atau informasi pembangunan yang disampaikan oleh Kepala Desa jarang menimbulkan kesalahpahaman” 94](#_Toc174024414)

[Tabel 25. Distribusi Frekuensi Pernyataan “Kepala Desa dalam penyampaian pesan-pesan pembangunan melalui berbagai forum pertemuan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat” 95](#_Toc174024415)

[Tabel 26. Distribusi Frekuensi Pernyataan “Masyarakat belum merasakan manfaat dari setiap pesan pembangunan atau kebijakan yang baru” 96](#_Toc174024416)

[Tabel 27. Distribusi Frekuensi Pernyataan “Kepala Desa sering mengadakan pendekatan kepada masyarakat secara informal melalui anjangsana atau mengajak bicara secara pribadi” 97](#_Toc174024417)

[Tabel 28. Distribusi Frekuensi Pernyataan “Forum seperti pengajian atau kebaktian rumah tangga digunakan oleh Kepala Desa untuk menyampaikan pesan pembangunan” 98](#_Toc174024418)

[Tabel 29. Distribusi Frekuensi Pernyataan “Forum pertemuan dengan tokoh masyarakat sering dilakukan oleh Kepala Desa” 98](#_Toc174024419)

[Tabel 30. Distribusi Frekuensi Pernyataan “Kepala Desa memanfaatkan jaringan hubungan kerja melalui forum-forum seperti paguyuban dan asosiasi dalam melakukan hubungan kerja keluar” 99](#_Toc174024420)

[Tabel 31. Distribusi Frekuensi Pernyataan “Sumber media massa seperti radio dan TV sering dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari selain pesan atau informasi pembangunan yang disampaikan oleh Kepala Desa” 100](#_Toc174024421)

[Tabel 32. Distribusi Frekuensi Pernyataan “Kepala Desa selalu menindaklanjuti setiap ada perubahan kebijakan,” 101](#_Toc174024422)

[Tabel 33. Distribusi Frekuensi Pernyataan “Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Kepala Desa di lembaga desa sangat lambat” 101](#_Toc174024423)

[Tabel 34. Distribusi Frekuensi Pernyataan “Hubungan yang dilakukan oleh Kepala Desa dengan organisasi/lembaga seperti BPD, LPM, PKK banyak menemui kesulitan” 102](#_Toc174024424)

[Tabel 35. Distribusi Frekuensi Pernyataan “Hubungan kerja Kepala Desa dengan pemerintah di tingkat atasnya banyak menghadapi hambatan” 103](#_Toc174024425)

[Tabel 36. Distribusi Frekuensi Pernyataan “Masyarakat memberi dukungan terhadap langkah-langkah yang dilakukan oleh Kepala Desa” 104](#_Toc174024426)

[Tabel 37. Distribusi Frekuensi Pernyataan “Ada suasana dialogis, saling bertukar pikiran antara Kepala Desa dengan semua elemen yang ada dalam memecahkan persoalan pembangunan di desa” 104](#_Toc174024427)

[Tabel 38. Distribusi Frekuensi Pernyataan “Adanya keterbukaan dalam penyampaian informasi pada saat laporan pertanggungjawaban” 105](#_Toc174024428)

[Tabel 39. Distribusi Frekuensi Pernyataan “Kepala Desa sering menindaklanjuti setiap permasalahan yang dihadapi dari hasil musyawarah yang telah disepakati” 106](#_Toc174024429)

[Tabel 40. Distribusi Frekuensi Pernyataan “Masyarakat masih merasa sulit memperoleh informasi yang diperlukan dalam rangka ikut mengontrol kinerja Pemerintah Desa” 107](#_Toc174024430)

[Tabel 41. Distribusi Frekuensi Pernyataan “Masyarakat mendapat kemudahan layanan dari Pemerintah Desa sesuai dengan harapan” 108](#_Toc174024431)

[Tabel 42. Distribusi Frekuensi Pernyataan “Bantuan yang diberikan oleh Pemerintah baik dana maupun teknis mampu memancing swadaya masyarakat yang lebih besar” 108](#_Toc174024432)

[Tabel 43. Distribusi Frekuensi Pernyataan “Perubahan kebijakan di lembaga desa seperti Pemdes, LPM, dan BPD tidak memberikan dampak positif pada tatanan gotong-royong masyarakat” 109](#_Toc174024433)

[Tabel 44. Distribusi Frekuensi Pernyataan “Lembaga desa lebih memperlihatkan kemampuan kerjasama secara sinergis dengan lembaga supradesa setelah adanya perubahan kebijakan” 110](#_Toc174024434)

[Tabel 45. Distribusi Frekuensi Pernyataan “Kepala Desa mampu memperjuangkan kepentingan masyarakat” 111](#_Toc174024435)

[Tabel 46. Distribusi Frekuensi Pernyataan “Kepala Desa dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya sudah sesuai dengan apa yang diharapkan” 111](#_Toc174024436)

[Tabel 47. Distribusi Frekuensi Pernyataan “Masyarakat aktif dalam menjalankan program pembangunan desa” 112](#_Toc174024437)

[Tabel 48. Distribusi Frekuensi Pernyataan “Program bantuan Pemerintah dalam pelaksanaannya kurang menyentuh warga miskin” 113](#_Toc174024438)

[Tabel 49. Distribusi Frekuensi Pernyataan “Pemanfaatan bantuan Pemerintah belum sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai” 113](#_Toc174024439)

[Tabel 50. Distribusi Frekuensi Pernyataan “Kepala Desa dapat merealisasikan program-program Pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat” 114](#_Toc174024440)

[Tabel 51. Distribusi Frekuensi Pernyataan “Program-program pembangunan telah dirasakan masyarakat untuk kelancaran berusaha” 115](#_Toc174024441)

[Tabel 52. Distribusi Frekuensi Pernyataan “Daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sudah ada peningkatan setelah adanya program bantuan dari Pemerintah” 116](#_Toc174024442)

[Tabel 53. Distribusi Frekuensi Pernyataan “Masyarakat berperan aktif dalam inovasi desa” 116](#_Toc174024443)

[Tabel 54. Distribusi Frekuensi Pernyataan “Kepala Desa kurang mampu menyelaraskan pembangunan dengan tuntutan perubahan jaman” 117](#_Toc174024444)

[Tabel 55. Distribusi Frekuensi Pernyataan “Rasa tanggungjawab lembaga desa semakin meningkat” 118](#_Toc174024445)

[Tabel 56. Distribusi Frekuensi Pernyataan “Pemerintah desa dan lembaga-lembaga yang ada di desa masih ketergantungan kepada pemerintah” 118](#_Toc174024446)

[Tabel 57. Distribusi Frekuensi Pernyataan “Perkembangan peranan lembaga-lembaga di desa saat ini bisa memajukan pembangunan desa” 119](#_Toc174024447)

[Tabel 58. Rentang Skala Variabel “Peran Komunikasi” 121](#_Toc174024448)

[Tabel 59. Rentang Skala Variabel “Pemberdayaan Masyarakat” 122](#_Toc174024449)

[Tabel 60. Hasil Uji Validitas Peran Komunikasi (X) 124](#_Toc174024450)

[Tabel 61. Hasil Uji Validitas Pemberdayaan Masyarakat (Y) 125](#_Toc174024451)

[Tabel 62. Hasil Uji Reliabilitas 126](#_Toc174024452)

[Tabel 63. Hasil Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov 130](#_Toc174024453)

[Tabel 64. Hasil Uji Multikolinearitas 131](#_Toc174024454)

[Tabel 65. Hasil Uji Autokorelasi 133](#_Toc174024455)

[Tabel 66. Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana 135](#_Toc174024456)

[Tabel 67. Hasil Uji Signifikan Parameter Individual 136](#_Toc174024457)

[Tabel 68. Hasil Analisis Koefisien Determinasi 137](#_Toc174024458)

# DAFTAR GAMBAR

[Gambar 1. Kerangka Pemikiran 44](#_Toc174024316)

[Gambar 2. Jenis Data 52](#_Toc174024317)

[Gambar 3. Peta Desa Jatilawang 74](#_Toc174024318)

[Gambar 4. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Jatilawang 76](#_Toc174024319)

[Gambar 5. Grafik Histogram 128](#_Toc174024320)

[Gambar 6. Grafik P-P Plotof Regression Standardized Residual 129](#_Toc174024321)

[Gambar 7. Grafik Scatterplot 134](#_Toc174024322)

# DAFTAR LAMPIRAN

[Lampiran 1. Kuesioner Penelitian 147](#_Toc175337411)

[Lampiran 2. Tabulasi Data 153](#_Toc175337412)

[Lampiran 3. Tabulasi Data MSI 158](#_Toc175337413)

[Lampiran 4. Klasifikasi Responden 162](#_Toc175337414)

[Lampiran 5. Hasil Uji Validitas 163](#_Toc175337415)

[Lampiran 6. Hasil Uji Reliabilitas 165](#_Toc175337416)

[Lampiran 7. Hasil Uji Normalitas 166](#_Toc175337417)

[Lampiran 8. Uji Multikolinearitas 168](#_Toc175337418)

[Lampiran 9. Hasil Uji Autokorelasi 169](#_Toc175337419)

[Lampiran 10. Hasil Uji Heteroskedastisitas 170](#_Toc175337420)

[Lampiran 11. Hasil Uji Regresi Linier Sederhana 171](#_Toc175337421)

[Lampiran 12. Hasil Uji Hipotesis 172](#_Toc175337422)

[Lampiran 13. Hasil Analisis Koefisien Determinasi 173](#_Toc175337423)

[Lampiran 14. Dokumentasi Penelitian 174](#_Toc175337424)

[Lampiran 15. Hasil Similarity 175](#_Toc175337425)

[Lampiran 16. Berita Acara Ujian Skripsi 176](#_Toc175337426)

[Lampiran 17. Berita Acara Bimbingan Skripsi 177](#_Toc175337427)

[Lampiran 18. Surat Ijin Penelitian 178](#_Toc175337428)

[Lampiran 19. Surat Balasan Penelitian 179](#_Toc175337429)

# BAB I

# PENDAHULUAN

## I.1. Latar Belakang

Komunikasi merupakan proses pertukaran pesan secara verbal ataupun non verbal antara pengirim dan penerima pesan untuk mengubah tingkah laku. Komunikasi sangat diperlukan dalam pembangunan, baik komunikasi intern maupun komunikasi ekstren di lingkungan pemimpin dan bawahannya maupun masyarakatnya. Kedua komunikasi tersebut sangat memberikan pengaruh terhadap kelancaran, kemudahan, dan kenyamanan dalam menjalankan tugas. Komunikasi intern merupakan komunikasi antar personal yang ada dalam organisasi. Komunikasi intern harus selalu dikembangkan, baik oleh Kepala Desa maupun oleh Aparatur Desa lainnya. Komunikasi intern yang terbina dengan baik akan memberikan kemudahan dan keringanan dalam menjalankan pekerjaan desa yang telah menjadi tugas bersama untuk merialisasikan program pembangunan.

Peran komunikasi tidak hanya sebagai sarana atau alat bagi Kepala Desa dalam menyampaikan informasi, misalnya tentang suatu kebijakan, akan tetapi juga sebagai sarana memadukan berbagai aktifitas secara terorganisasi dalam mewujudkan kerjasama. Dengan adanya komunikasi yang baik dengan masyarakat akan memberikan dampak positif terhadap eksistensi pemerintah desa. Interaksi langsung yang terjadi antara Kepala Desa dan masyarakat disebabkan adanya kondisi ataupun lingkungan pekerjaan yang mendukung. Selain itu komunikasi dapat membangun kebersamaan dengan membentuk sebuah kontak dalam suatu hubungan. Hal ini berarti Kepala Desa dan masyarakatnya saling memberikan informasi, pemikiran dan sikap dalam hubungan.

Pemerintah memberikan perhatian yang besar pada pembangunan di pedesaan dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Perhatian tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa desa merupakan tempat berdiamnya sebagian besar rakyat Indonesia. Selain itu kedudukan desa dan masyarakatnya merupakan dasar landasan kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Pemerintahan desa sebagai pemerintahan yang paling rendah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan Republik Indonesia. Kedudukan desa dalam pelaksanaan pembangunan mempunyai arti yang sangat penting karena desa berhubungan secara langsung dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Desa sebagai unit pemerintahan terendah sebagai sasaran program-program dari hampir semua instansi pemerintah. Maka dari itu, kegagalan program di tingkat desa akan memberikan dampak bagi kegagalan program pemerintahan di atasnya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah memberikan keleluasaan bagi desa dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian masyarakat desa dapat mewujudkan masyarakat yang otonom sebagai otonomi yang asli. Desa yang otonom memberikan ruang gerak yang luas pada perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga tidak banyak terbebani oleh program-program kerja dari berbagai instansi dan pemerintah. Apabila otonomi desa dapat terwujud, maka tidak akan terjadi urbanisasi tenaga kerja potensial ke kota untuk mencari lapangan kerja.

Model pembangunan yang partisipatif merupakan program yang dikelola sendiri oleh masyarakat yang bersangkutan, bukan oleh aparat pemerintah. Untuk menumbuhkembangkan partisipasi dalam pembangunan yang memberikan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat, perlu dipikirkan tipe-tipe fasilitas tertentu yang bukan saja mampu meningkatkan partisipasi itu sendiri tetapi juga mampu meningkatkan kemadirian masyarakat. Kegagalan program pembangunan pedesaan di masa lalu banyak disebabkan karena penyusunan, pelaksanaan, dan evalausi program-program pembangunan yang tidak melibatkan masyarakat sehingga terkesan bahwa semua program pembangunan yang dilaksanakan hanya menempatkan masyarakat sebagai obyek pembangunan saja.

Pembangunan dalam konteks otonomi daerah lebih mengarahkan pada konsensus bersama antara pemerintah dengan masyarakat sebagai penerima dampak dari kebijakan pembangunan. Seluruh konsep pembangunan yang dilakukan harus memuat proses pemberdayaan yang mengarah pada kemandirian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Konsep pemberdayaan dalam konteks kedaerahan lebih cenderung pada arah pembangunan yang berbasis pada masyarakat desa. Konsep pembangunan masyarakat desa banyak diarahkan pada proses pemberdayaan masyarakat seutuhnya dengan pelibatan diri masyarakat pada seluruh proses pembangunan yang dirancang.

Pemberdayaan masyarakat dimaknai sebagai proses penyerahan kekuasaan dari pemerintah kepada pihak yang tak berdaya terutama masyarakat miskin, supaya dapat memiliki kekuatan untuk membangun, serta meningkatkan daya masyarakat miskin sehingga memiliki kemampuan untuk membangun. Masyarakat miskin memiliki ciri ketidakberdayaan secara ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Secara ekonomi jelas masyarakat miskin berada di batas atau di bawah ambang kemampuan materiil untuk mencukupi kebutuhan hidup minimal yang diperlukan sebagai manusia wajar. Kemiskinan sosial, adanya masyarakat miskin yang memiliki keterbatassan di lingkungan sosial, baik untuk melakukan sosialisasi, interaksi secara vertikal bahkan untuk menjalin jaringan keluar dari lungkungannya. Secara kultural masyarakat miskin biasanya mendapatkan perlakuan yang tidak setara dan dipandang paling bawah dalam segmentasi atau struktur sosial. Secara politis masyarakat miskin tidak memiliki peluang untuk melakukan negosiasi terhadap kebijakan-kebijakan yang diberlakukan di wilayahnya, bahkan kebijakan yang mengintervensi di banyak segi kehidupan mereka sekalipun.

Pemberdayaan masyarakat sangat penting dalam memajukan kesejahteraan masyarakat desa dan pembangunan desa. Inti dari pemberdayaan masyarakat adalah bagaimana rakyat dibantu agar lebih berdaya sehingga tidak hanya dapat meningkatkan kapasitas dan kemampuannya dengan memanfaatkan potensi yang dimilikinya. Selain itu komunikasi yang baik juga memugkinkan Kepala Desa untuk melakukan sosialisasi terhadap progam pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat akan memahami tujuan dan manfaat dari pemeberdayaan yang dirancang oleh kepala desa, hal ini dapat meingkatkan partisipasi masyarakat dan memperkuat kerjasama antara pemerntah desa dan masyarakat deangan pendekatan dan komunikasi yang efektif. Tetapi juga sekaligus meningkatkan kamampuan ekonomi nasional. Adapun masyarakat yang perlu diberdayakan antara lain adalah kaum buruh, petani, orang miskin kota dan orang miskin desa.

Salah satu upaya pemberdayaan masyarakat yaitu melalui komunikasi. Dimana saat ini komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia. Dengan adanya komunikasi, manusia dapat saling berhubungan satu sama lain, baik dalam kehidupan sehari-hari di rumah tangga, di tempat pekerjaan, di pasar, dalam masyarakat atau di mana saja manusia berada. Tidak ada manusia yang tidak akan terlibat dalam komunikasi.

Seorang Kepala Desa sebagai administrator, maka dalam perannya tersebut harus menjadi sumber inovasi bagi pembinaan gagasan dan strategi yang menunjang pembaharuan dan pembangunan. Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah strategi yang dilakukan untuk melakukan kemandirian sosial ekonomi masyarakat dalam jangka panjang. Sasaran yang dituju adalah masyarakat miskin yang tidak memiliki keberdayaan secara ekonomi, sosial, budaya dan politik. Untuk mewujudkan pemberdayaan, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat perlu didukung oleh pengelolaan pembangunan yang partisipatif. Pada tatanan pemerintahan diperlukan perilaku pemerintahan yang jujur, terbuka, bertanggungjawab, dan demokrasi, sedangkan pada tatanan masyarakat perlu di kembangkan mekanisme yang memberikan peluang peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan bagi kepentingan bersama.

Kepala Desa memiliki peranan yang sangat penting dalam pemberdayaan masyarakat. Maka dari itu Kepala Desa harus memiliki komunikasi yang efektif. Kepala Desa dapat mendengarkan kebutuhan dan aspirsi masyarakat dalam mengkoordinasikan progam-progam pemberdayaan serta memobilisasi sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Komunikasi yang baik antara Kepala Desa dengan masyarakat akan memudahkan arah dan tujuan pembangunan serta membangun rasa kepercayaan antara Kepala Desa dengan masyarakat. Namun efektivitas komunikasi Kepala Desa seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk kurangnya komunikasi yang memadai, keterbatasan sumber daya, serta adanya ketegangan konflik internal di dalam masyarakat.

Berdasarkan pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahtraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, prilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Perhatian pemerintah pada pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dengan adanya kebijakan penggunaan dana desa yang memprioritaskan pada pemberdayaan dan pengembangan potensi ekonomi desa pada tahun 2020 (Kemenko PMK, 2020). Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Bab I Pasal 1 ayat (2). Penggunaan dana desa pada program kegiatan pemberdayaan masyarakat harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa. Maka dari itu diperlukan pengelolaan yang baik dari pemerintah desa sehingga dapat memanifestasikan pencapaian tujuan dan sasaran dana desa terutama yang berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian (Hulu dkk, 2018) menyatakan bahwa pengelolaan dana desa harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa dan prioritas program yang telah ditetapkan pemerintah desa. Tetapi pada kenyataannya masih banyak desa yang ada di seluruh Indonesia yang tidak menerapkan kebijakan tersebut karena terbentur dengan kepentingan politik Kepala Desa.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Indonesia dari tahun ke tahun selalu menjadi dilema. Adapun dilema pemberdayaan masyarakat, antara lain: berbagai upaya pemberdayaan tidak berhadapan dengan kenyataan yang pasti tentang pemahaman mengenai pengentasan kemiskinan, adanya perbedaan pendapat tentang ukuran keberhasilan upaya pemberdayaan masyarakat, upaya pemberdayaan masyarakat bersifat pemberian bantuan tidak dapat menjawab masalah ketidakberdayaan yang ada, adanya perbedaan pendapat mengenai keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat oleh pelaku pembangunan terutama antara pemerintah dan organisasi non pemerintah, masyarakat lebih memilih program pemberdayaan berupa bantuan ekonomi dari pada program yang menggerakkan usaha mandiri, bentuk pola kemitraan masih timpang hingga kapasitas antar pihak tidak setara, globalisasi menyebabkan peran negara menyusut karena pembangunan yang berorientasi pasar sehingga melahirkan ketidakberdayaan baru, dan konsep kesejahteraan telah dirancang dalam UUD 1945 akan tetapi dilema yang dihadapi yaitu adanya konsep tapi tidak dapat mewujudkan konsep tersebut.

Desa Jatilawang merupakan desa yang terletak di Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah dengan jarak tempuh darat ke kecamatan kurang lebih 4 km dan 21 km ke arah ibu kota Kabupaten Tegal di Slawi. Desa Jatilawang berada pada posisi koordinat bujur 109.1986 dengan koordinat lintang -6.900625 dengan ketinggian DPL (M)³, termasuk dalam topografis daerah pantai dengan jenis tanah yang tergolong dalam tanah alluvial yaitu jenis tanah yang potensial untuk pengembangan produk pertanian seperti padi, palawija, hortikultura dan perkebunan. Desa Jatilawang memiliki luas wilayah 170.00 m2 dengan jumlah penduduk 6.352 jiwa dan 1.853 KK.

Tabel 1. Data Pekerjaan Penduduk Desa Jatilawang

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pekerjaan | Laki-laki | Perempuan |
| Petani | 175 | 163 |
| Buruh Tani | 180 | 159 |
| Buruh Migran | 17 | 20 |
| Pegawai Negeri Sipil | 10 | 7 |
| Pengrajin Industri Rumah Tangga | 23 | 4 |
| Pedagang Keliling | 19 | 8 |
| Peternak | 59 | 9 |
| Dokter | 1 | - |
| Bidan | - | 1 |

Sumber: Desa Jatilawang, 2024

Berdasarkan tabel 1 tentang data pekerjaan penduduk Desa Jatilawang diketahui bahwa pekerjaan atau mata pencaharian masyarakatnya antara lain: petani, buruh tani, buruh migran, Pegawai Negeri Sipil (PNS), pengrajin industri rumah tangga, pedagang keliling, peternak, dokter, dan bidan. sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Jatilawang bermata pencaharian sebagai buruh tani yaitu sebanyak 339 orang dengan rincian laki-laki sebanyak 180 orang dan perempuan sebanyak 159 orang.

Hal tersebut menjadikan penghasilan masyarakat Desa Jatilawang sangat rendah, masih jauh di bawah UMR. Dengan penghasilan yang rendah, sementara kebutuhan ekonomi yang banyak menyebabkan kebutuhan ekonomi tidak dapat tercukupi semua. Sehingga kondisi ekonomi yang terbatas ini mempengaruhi tingkat pendidikan masyarakat. Dengan adanya tingkat pendidikan yang rendah menjadikan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi rendah karena pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan adanya kemampuan berpikir logis, analistis, sistematis, kritis dan kreatif mampu menghadapi keadaan yang selalu berubah, tidak pasti dan kompetitif.

Di samping itu, banyaknya jumlah penduduk di Desa Jatilawang tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan di sekitar yang memadai menyebabkan penyerapan tenaga kerja yang minim. Hal ini akan mengakibatkan angka pengangguran semakin tinggi dan akan berdampak pada tingginya angka kemiskinan di Desa Jatilawang.

Selain itu, ada beberapa permasalahan yang terjadi di Desa Jatilawang seperti kurangnya pendekatan dan komunikasi Kepala Desa pada masyarakat yang belum mengerti apa itu pemberdayaan, kurangnya pembinaan pada pemuda-pemudi untuk menguatkan pembangunan fisik dan mental. Untuk dapat membantu peningkatan progam-program yang ada di Desa Jatilawang seperti Karang Taruna yang masih kurang anggota, sementara jumlah pemuda yang ada sangat banyak. Beberapa permasalahan tersebut dari tahun ke tahun tidak kunjung usai. Dengan adanya peran komunikasi Kepala Desa yang baik diharapkan dapat memberdayakan masyarakat Desa Jatilawang sehingga segala permasalahan yang ada dapat terselesaikan dan menjadikan masyarakat yang sejahtera.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti menganggap penting dan tertarik untuk menjadi bahan penelitian, deangan judul “Pengaruh Peran Komunikasi Kepala Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal”

## I.2. Rumusan Masalah

Memperhatikan uraian di atas maka yang menjadi masalah dalam penelitian adalah apakah peran komunikasi Kepala Desa berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal?

## I.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh peran komunikasi Kepala Desa terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal.

## I.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ganda, yaitu manfaat teoritis (akademis) maupun praktis:

I.4.1 Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis (akademis) dari penelitian ini antara lain:

1. Dapat menjadi tambahan referensi dan bahan pengembangan penelitian selanjutnya mengenai peran komunikasi Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat.
2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi pembanding terhadap penelitian pada hal yang sama.

I.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini antara lain:

I.4.2.1 Bagi Peneliti

Bagi peneliti hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana untuk melatih berfikir secara ilmiah dengan berdasarkan pada disiplin ilmu yang telah diperoleh di bangku kuliah dan menerapkannya pada data yang diperoleh dari objek yang diteliti.

I.4.2.2 Bagi Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal

Diharapkan dapat menjadi motivasi Kepala Desa maupun masyarakatnya dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.

I.4.2.3 Bagi Kalangan Akademik dan Pembaca

Diharapkan dapat menambah khasanah perpustakaan dengan tambahan refrensi bagi penelitian selanjutnya mengenai pengaruh peran komunikasi Kepala Desa terhadap pemberdayaan masyarakat.

# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

## II.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sebagai bahan referensi untuk menemukan informasi, dengan menggunakan peneliti terdahulu bisa menentukan arah dan tujuan yang sama sehingga peneliti dapat mengumpulkan data-data yang valid dan relevan.

* + - 1. Adolfina Patanduk (2014) berjudul “Pengaruh Komunikasi terhadap Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Perdesaan di Kabupaten Lamandau”

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh komunikasi terhadap pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan perdesaan. Sampel penelitian berjumlah 94 orang. Teknik pengolahan data menggunakan analisis jalur. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh komunikasi terhadap pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan perdesaan.

* + - 1. Kartini, Syarwani Ahmad, dan Syaiful Eddy (2020) berjudul “Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Komunikasi Interpersonal terhadap Kinerja Guru”

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh antara gaya kepemimpinan kepala sekolah dan komunikasi interpersonal terhadap kinerja guru di SMP Negeri 3 Sanga Desa. Penelitian ini menggunakan analisis data regresi linier berganda. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 22 orang. Hasil penelitian menunjukan bahwa gaya kepemimpinan kepala sekolah dan komunikasi interpersonal berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja guru.

* + - 1. Monica Feronica Bormasa (2021) berjudul “Pengaruh Peran Pemerintah Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat”

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh peran pemerintah desa terhadap pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan analisis data regresi linier sederhana. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 56 orang. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikansi peran pemerintah desa terhadap pemberdayaan masyarakat desa di Desa Romean Kecamatan Yaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Berikut ini adalah tabel penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan referensi untuk menemukan informasi.

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Nama Peneliti/Tahun | Judul Penelitian | Metode Penelitian | Hasil Penelitian | Perbedaan |
| 1 | Adolfina Patanduk (2014) | Pengaruh Komunikasi terhadap Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Perdesaan di Kabupaten Lamandau | Analisis jalur | Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh komunikasi terhadap pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan perdesaan | Analisis data menggunakan analisis jalur |
| 2 | Kartini, Syarwani Ahmad, dan Syaiful Eddy (2020) | Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Komunikasi Interpersonal terhadap Kinerja Guru | Regresi Linier Berganda | Hasil penelitian menunjukan bahwa gaya kepemimpinan kepala sekolah dan komunikasi interpersonal berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja guru. | Variabel Gaya Kepemimpinan dan Kinerja Guru |
| 3 | Monica Feronica Bormasa (2021) | Pengaruh Peran Pemerintah Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat | Regresi Linier Sederhana | Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikansi peran pemerintah desa terhadap pemberdayaan masyarakat desa di Desa Romean Kecamatan Yaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat. | Variabel Peran Pemerintah Desa |

Sumber: Data Diolah, 2024

## II.2. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan visualisasi hubungan antara berbagai variabel untuk menjelaskan sebuah fenomena (Wibowo, 2014). Hubungan antara berbagai variabel digambarkan dengan lengkap dan menyeluruh dengan alur dan skema yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena.Sumber pembuatan kerangka teori adalah dari paparan satu atau lebih teori yang terdapat pada tinjauan pustaka. Pemilihan teori dapat menggunakan salah satu teori atau memodifikasi dari berbagai teori, selama teori yang dipilih relevan dengan keseluruhan substansi penelitian yang akan dilakukan.

Kerangka teori merupakan dasar dari keseluruhan proyek penelitian. Di dalamnya dikembangkan, diuraikan dan dielaborasi hubungan-hubungan di antara variabel-variabel yang telah diidentifikasi melalui proses pengumpulan data awal, baik wawancara atau observasi, dan juga studi literatur dalam kajian pustaka. Menurut Uma Sekaran (1984), yang dimaksud dengan “Kerangka kerja teoritis adalah model konseptual yang menggambarkan hubungan di antara berbagai macam faktor yang telah diidentifikasikan sebagai sesuatu hal yang penting bagi suatu masalah”. Dengan kata lain, kerangka kerja teoritis membahas keterhubungan antar variabel yang dianggap terintegrasikan dalam dinamika situasi yang akan diteliti. Melalui pengembangan kerangka kerja konseptual, memungkinkan kita untuk menguji beberapa hubungan antar variabel, sehingga kita dapat mempunyai pemahaman yang komprehensif atas masalah yang sedang kita teliti.

**II.2.1. Komunikasi Pembangunan**

Komunikasi pembangunan dalam arti luas meliputi peran dan fungsi komunikasi (sebagai suatu aktivitas pertukaran pesan secara timbal balik) di antara semua pihak yang terlibat dalam usaha pembangunan; terutama antara masyarakat dengan pemerintah, sejak dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian terhadap pembangunan. Sedangkan dalam arti yang sempit, komunikasi pembangunan merupakan segala upaya dan cara, serta teknik penyampaian gagasan dan keterampilan-keterampilan pembangunan yang berasal dari pihak yang memprakarsai pembangunan dan ditujukan kepada masyarakat luas. Kegiatan tersebut bertujuan agar masyarakat yang dituju dapat memahami, menerima, dan berpartisipasi dalam melaksanakan gagasan-gagasan.

Peran komunikasi pembangunan yang diutamakan adalah mendidik dan memotivasi masyarakat, bukannya memberi laporan yang tidak realistik dari fakta-fakta atau sekedar penonjolan diri. Tujuan komunikasi pembangunan adalah untuk menanamkan gagasan-gagasan, sikap mental, dan mengajarkan keterampilan yang dibutuhkan oleh suatu negara berkembang.

Secara pragmatis, Quebral menyatakan bahwa komunikasi pembangunan adalah komunikasi yang dilakukakn untuk melaksanakan rencana pembangunan suatu negara. Keterliabatan masyarakat dalam proses pembangunan bukan karena mobilisasi, melainkan sebagai bentuk partisipasi yang dilandasi oleh determinasi dan kecerdasan. Dalam proses pembangunan masyarakat tidak semata-mata diperlakukan sebagai objek, tetapi lebih sebagai subjek.

**II.2.2. Teori Komunikasi Pemerintahan**

Teori Komunikasi Pemerintahan

Komunikasi pemerintah menurut Erliana Hasan (2005:95) adalah penyampaian ide, program, dan gagasan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan negara. Dalam hal ini pemerintah dapat diasumsikan sebagai komunikator dan masyarakat sebagai komunikan, namun dalam suasana tertentu bisa sebaliknya masyarakat berada pada posisi sebagai penyampai ide atau gagasan dan pemerintah berada pada posisi mencermati apa yang diinginkan masyarakat.

Kondisi tersebut menunjukkan pemerintah memiliki kewenangan dan tanggungjawab untuk mempertimbangkan, bahkan untuk merespon keinginan-keinginan tersebut sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Konsep yang dipelajari sebagai bahan buat konstruksi komunikasi pemerintahan dari definisi komunikasi pemasaran adalah target audien yang dalam komunikasi pemerintahan adalah pemerintah dan yang diperintah dalam berbagai posisi dan peranannya (Ndraha, 2001:621).

Pada saat ini pemerintah menggunakan komunikasi pemerintahan dan persamaan persepsi di antara masyarakat dan pemerintah terhadap suatu kebijakan. Komunikasi pemerintahan yang terjadi di Indonesia pun lebih cenderung pada model komunikasi dua arah di mana komunikator pemerintah mendapat masukan-masukan dari komunikan masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam setiap langkahnya ketika membuat kebijakan-kebijakan yang berkenaan dengan masyarakat.

Komunikasi pemerintahan yang dibentuk di Indonesia bisa digambarkan sebagai bentuk komunikasi yang lebih mengarah pada model komunikasi dua arah. Komunikator yaitu aparatur pemerintah memperoleh saran dan masukan dari komunikan masyarakat sebagai langkah dalam mempertimbangankan semua keputusannya saat menyusun aturan-aturan yang mempunyai hubungannya dengan masyarakat.

1. Model Komunikasi Shannon dan Weaver

Pada tahun 1948, Claude Elwood Shannon dan Warren Weaver mengembangkan model komunikasi linier tunggal yang dikenal sebagai model Shannon dan Weaver. Ada enam (enam) elemen dalam model komunikasi Shannon dan Weaver, yaitu:

* 1. Pengirim (Sumber informasi): orang yang membuat pesan, memilih media yang akan digunakan, dan mengirim pesan.
  2. *Encoder* (*Transmitter*): orang yang menggunakan perangkat yang mengubah data menjadi sinyal atau format biner lainnya. Selain itu, *encoder* mungkin juga merujuk pada mesin yang sebenarnya.
  3. Media: saluran melalui mana pesan dikirim disebut media.
  4. *Decoder* (*Transmitter*): perangkat yang mengubah data biner dari sinyal menjadi pesan atau penerima pesan yang menerjemahkan pesan dari sinyal yang diberikan.
  5. Penerima (*Receiver*/*Destination*): penerima komunikasi atau lokasi di mana ia harus tiba. Berdasarkan pesan yang dikirim oleh pengirim, penerima pesan menawarkan umpan balik.
  6. *Nose*/gangguan fisik yang disebabkan oleh lingkungan, orang lain, dan faktor lain yang menghalangi pendengar pesan untuk memahaminya.

Pesan dikodekan oleh pengirim pesan dan dikirim melalui media ke penerima pesan. Pemancar mengubah pesan menjadi berbagai kode yang dapat dimengerti mesin. Melalui media, pesan ditransmisikan dalam bentuk kode. Sebelum menguraikan dan mendekode komunikasi, penerima harus menerima sandi pesan. Dalam beberapa keadaan, perangkat penerima juga dapat berfungsi sebagai penerima kata sandi. Masalah komunikasi dapat diakibatkan oleh gangguan pada media dan penerima tanpa kemampuan perlindungan kata sandi.

Menurut model ini, terdapat tiga macam permasalahan komunikasi, yaitu masalah teknis, masalah semantik, dan masalah efektifitas.

* + - * 1. Masalah teknis: masalah yang disebabkan oleh *channel*.
        2. Masalah semantik: adanya perbedaan dalam mengartikan pesan yang dikirim dan diterima.
        3. Masalah efektivitas: reaksi penerima terhadap pesan yang disampaikan.

Pendekatan ini awalnya dibuat untuk meningkatkan metode komunikasi, khususnya komunikasi telepon, dengan tujuan meningkatkan kapasitas telepon dan mengurangi interferensi. Namun untuk menciptakan komunikasi yang efektif, paradigma ini kemudian diterapkan pada semua jenis komunikasi.

Model komunikasi Shannon dan Weaver memiliki beberapa karakteristik, yaitu:

Komunikasi berlangsung dalam dua proses yang membuatnya sebagai model yang dapat diterapkan dalam semua bentuk komunikasi.

Konsep gangguan atau noise membantu dalam membuat komunikasi efektif dengan cara menghilangkan gangguan atau masalah yang menyebabkan berbagai gangguan.

Hanya dapat diterapkan dengan baik pada komunikasi interpersonal dibandingkan dengan komunikasi massa atau komunikasi kelompok.

Penerima pesan berperan sebagai bagian yang pasif dalam proses komunikasi.

Pengirim pesan berperan aktif dalam mengirim pesan.

Umpan balik tidak begitu penting jika dibandingkan dengan pesan yang dikirimkan oleh pengirim.

**II.2.3. Peran**

Pengertian Peran

Menurut Soekanto (2012:212-213) peran adalah proses dinamis kedudukan (status). Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki bermacam-macam karakteristik dalam melaksanakan tugas kewajiban atau tanggungjawab yang diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga. Tugas-tugas tersebut merupakan batasan seseorang untuk melaksanakan pekerjaan yang berdasarkan peraturan-peraturan dari organisasi atau lembaga tersebut agar segala pekerjaan dapat tertata rapi dan dapat dipertanggungjawabkan oleh setiap pegawainya. Peran memang tidak dapat dipisahkan dengan peranan karena jika seseorang pejabat atau kelompok bahkan individu sudah melakukan perannya maka seorang pejabat/pemimpin sudah berperanan dalam kelompok tersebut.

Levinson dalam Soekanto (2012:213) mengatakan peranan mencakup tiga hal, antara lain sebagai berikut:

Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.

Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

Konsep Peran

Menurut Soekanto (2012:213) terdapat tiga konsep peran, diantaranya sebagai berikut:

Persepsi Peran

Persepsi peran merupakan sebuah pandangan kita terhadap tindakan yang seharusnya dilakukan pada situasi tertentu. Persepsi tersebut berdasarkan interpretasi atas sesuatu yang diyakini mengenai bagaimana seharusnya kita dalam berperilaku.

* 1. Ekspetasi Peran

Ekspektasi peran ini ialah sesuatu yang telah diyakini orang lain bagaimana seseorang harus bertindak dalam situasi tertentu. Sebagian besar perilaku seseorang tersebut ditentukan oleh peran yang didefinisikan dalam konteks yang mana orang tersebut bertindak.

* 1. Konflik Peran

Saat seseorang berhadapan dengan ekspektasi peran yang berbeda, maka akan menimbulkan konflik peran. Konflik tersebut akan muncul disaat seseorang menyadari bahwa syarat satu peran lebih berat untuk dipenuhi ketimbang peran lain.

1. Struktur Peran

Menurut Soekanto (2012:214) secara umum struktur peran ini dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, antara lain:

* 1. Peran Formal

Peran formal merupakan suatu peran yang nampak jelas, yaitu segala perilaku yang sifatnya itu homogen. Contohnya seperti dalam keluarga, suami/ayah dan istri/ibu memiliki peran sebagai *provider* (penyedia), pengatur rumah tangga, merawat anak, rekreasi, serta lain-lain.

* 1. Peran Informal

Peran informal ini merupakan peran yang tertutup, yakni suatu peran yang memiliki sifat implisit (emosional) serta umumnya tidak terlihat di permukaan. Tujuan dari peran informal ini ialah untuk pemenuhan kebutuhan emosional serta juga menjaga keseimbangan dalam keluarga.

1. Jenis Peran

Menurut Soerjono Soekanto (2012:214), jenis-jenis peran ini antara lain sebagai berikut:

* 1. Peran Aktif

Peran aktif merupakan suatu peran seseorang seutuhnya selalu aktif dalam tindakannya pada suatu organisasi. Hal tersebut bisa dilihat atau diukur dari kehadirannya serta juga kontribusinya terhadap suatu organisasi.

* 1. Peran Partisipasif

Peran partisipasif merupakan suatu peran yang dilakukan seseorang dengan berdasarkan kebutuhan atau hanya pada saat tertentu saja.

* 1. Peran Pasif

Peran pasif merupakan suatu peran yang tidak dilaksanakan oleh individu. Artinya, peran pasif ini hanya dipakai sebagai simbol dalam situasi tertentu di dalam kehidupan masyarakat.

**II.2.4. Komunikasi**

* + - 1. Pengertian Komunikasi

Menurut Hafied Canggara (2015:25) komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain dengan tujuan untuk mempengaruhi pengetahuan dan perilaku seseorang.

Harun dan Ardianto (2011:19) menyatakan bahwa tanpa komunikasi interaksi antar manusia baik secara perorangan, kelompok, ataupun organisasi tidak mungkin dapat terjadi. Dua orang dikatakan melakukan interaksi apabila masing-masing melakukan aksi dan reaksi. Aksi dan reaksi yang dilakukan manusia ini, baik secara perorangan, kelompok, dan organisasi, dalami lmu komunikasi disebut sebagai tindakan komunikasi.

Sedangkan menurut Mulyana (2011:67) komunikasi terjadi ketika sumber menyampaikan pesan kepada penerima dengan niat untuk mempengaruhi perilaku penerima. Pengertian komunikasi secara umum yaitu sejak bangun tidur sampai tidur lagi, secara kodrati senantiasa terlibat dalam komunikasi. Terjadinya komunikasi adalah sebagai konsekuen hubungan sosial. Masyarakat paling sedikit terdiri dari dua orang yang saling berhubungan satu sama lain yang karena hubungan, menimbulkan interaksi sosial. Sehingga terjadinya interaksi sosial disebabkan interkoneksi.

* + - 1. Fungsi dan Tujuan Komunikasi
         1. Fungsi Komunikasi

Menurut Widjaja (2012:09-11) fungsi komunikasi dalam setiap sistem sosial antara lain:

1. Informasi: pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, penyebaran berita, data, gambar, fakta dan pesan opini dan komentar yang dibutuhkan agar dapat dimengerti dan beraksi secara jelas terhadap kondisi lingkungan dan orang lain agar dapat mengambl keputusan.
2. Sosialisasi (permasyarakatan): penyediaan sumber ilmu pengetahuan yang memungkinkan orang bersikap dan bertindak sebagai anggota masyarakat yang efektif sehingga ia sadar akan fungsi sosialnya sehingga ia dapat aktif dalam masyarakat.
3. Motivasi: menjelaskan setiap tujuan masyarakat yang pendek maupun jangka panjang, mendorong orang menentukan pilihannya dan keinginannya, mendorong kegiatan individu dan kelompok berdasarkan tujuan bersama yang akan dikejar.
4. Perdebatan dan diskusi: menyediakan dan saling menukar fakta yang perlu dilakukan untuk memungkinkan persetujuan atau menyelesaikan perbedaan pendapat mengenai masalah public yang menyangkut kepentingan bersama di tingkat nasional dan lokal.
5. Pendidikan: pengalihan ilmu pengetahuan sehingga mendorong perkembangan intelektual.
6. Memajukan kebudayaan: penyebran hasil kebudayaan dan seni dengan baik dengan maksud melestarikan warisan masa lalu, membangunkan imajinasi dan mendorong kreativitas dan kebutuhan estetikanya.
7. Hiburan: penyebarluasan sinyal, simbol, suara dan image dari drama, tari, kesenian, kesusasteraan music, olah raga, permainan dan lain-lain.
8. Integrasi: menyediakan bagi bangsa, kelompok dan individu kesempatan untuk memperoleh berbagai pesan yang mereka perlukan agar mereka dapat saling kenal dan mengerti dan menghargai kondisi, pndangan dan keinginan orang lain.
   * + - 1. Tujuan Komunikasi

Menurut Widjaja (2012:12) komunikasi mempunyai beberapa tujuan antara lain:

1. Sebagai pejabat ataupun komunikator kita harus menjelaskan kepada komunikan (penerima) atau bawahan dengan sebaik-baiknya dan tuntas sehingga mereka dapat mengikuti apa yang kita maksud.
2. Kita sebagai pejabat atau pimpinan harus mengetahui benar aspirasi masyarakat tentang apa yang diinginkannya, jangan mereka menginginkan arah untuk pergi ke barat tetapi kita memberikan jalan ke timur.
3. Kita harus berusaha agar gagasan dapat diterima oleh orang lain dengan pendekatan yang persuasif bukan memaksakan kehendak.
   * + 1. Unsur-Unsur Komunikasi

Menurut Cangara (2013:34-35) terdapat beberapa unsur penting dalam komunikasi, meliputi: adanya sumber, pesan, media, penerima, efek, umpan balik, dan lingkungan.

* + - * 1. Sumber adalah pihak yang menyampaikan atau mengirim pesan kepada penerima. Sumber sering disebut dengan banyak nama atau istilah, antara lain: komunikator, pengirim, atau dalam bahasa inggris disebut *source, sender,* atau *encoder*.
        2. Pesan adalah pernyataan yang disampaikan pengirim kepada penerima. Pernyataan bisa dalam bentuk tertulis maupun lisan maupun non-verbal yang bisa dimengerti oleh penerima. Dalam bahasa inggris pesan biasa diartikan dengan *katamessage,content* atau *information.*
        3. Media adalah alat yang digunakan untuk mentransfer pesan dari sumber kepada penerima. Media dalam pengertian di sini bisa berupa media massa yang mencakup poster, brosur, buku, spanduk, bulletin, stiker dan semacamnya.
        4. Penerima adalah pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirim dari sumber kepada penerima, antara lain: khalayak, sasaran, target, adopter, komunikan. Dalam bahasa inggris penerima biasanya disebut dengan nama *receiver, audience,* atau *decoder*.
        5. Efek atau pengaruh adalah perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan oleh penerima sebelum dan sesudah menerima pesan. Pengaruh bisa terjadi pada pengetahuan, sikap, dan tingkah laku seseorang. Pengaruh juga bisa diartikan perubahan atau penguatan keyakinan pada pengetahuan, sikap, dan tindakan seseorang sebagai akibat penerimaan pesan, pengaruh biasa disebut dengan nama akibat.
        6. Umpan balik adalah tanggapan yang diberikan oleh penerima sebagai akibat penerimaan pesan dari sumber. Sebenarnya ada juga yang bertanggapan bahwa umpan balik sebenarnya adalah efekatau pengaruh. Dalam bahasa inggris umpan balik sering disebut dengan istilah *feedback, reaction, response*.
        7. Lingkungan adalah situasi yang mempengaruhi jalannya komunikasi, lingkungan dapat diartikan dalam bentuk fisik, sosial budaya, psikologis, dan dimensi waktu. Sebuah informasi tidakbisa dikirim karena terhambat oleh kendala fisik, sehingga informasi itu surat kabar, radio, film, televisi, dan internet. Bisa juga berupa saluran misalnya kelompok pengajian atau arisan, kelompok pendengar dan pemirsa, organisasi masyarakat, rumah ibadah, pesta rakyat, panggung kesenian, serta media alternatif tidak bisa diterima.
      1. Proses Komunikasi

Proses komunikasi pada hakikatnya adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang kepada orang lain. Pandangan komunikasi mencakup komunikasi secara langsung maupun komunikasi dengan menggunakan media dan komunikasi merupakan aktivitas yang tidak terlepas dari kehidupan manusia (Mukarom, 2015:77-78). Adapun Proses komunikasi terbagi menjadi dua yaitu:

* + - * 1. Proses Komunikasi Tatap Muka

Dikatakan komunikasi tatap muka karena pada saat komunikasi berlangsung antara komunikator dan komunikan saling berhadapan dan melihat. Berdasarkan jumlah komunikan yang dihadapi komunikator, komunikasi tatap muka diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Komunikasi Interpersonal

Komunikasi interpersonal adalah komunikasi antara komunikator dengan seorang komunikan. Komunikasi jenis ini dianggap paling efektif dalam hal upaya mengubah sikap, pendapat, atau perilaku seseorang.

Pentingnya situasi komunikasi interpersonal seperti itu bagi komunikator adalah karena dapat mengetahui diri komunikan selengkap-lengkapnya. Dengan demikian komunikator dapat mengarahkan ke suatu tujuan sebagaimana diinginkan.

1. Komunikasi Kelompok

Komunikasi kelompok termasuk komunikasi tatap muka karena komunikator dan komunikan berada dalam situasi saling berhadapan dan saling melihat. Sama dengan komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok pun menimbulkan arus balik. Komunikator mengetahui tanggapan komunikan pada saat sedang berkomunikasi, sehingga apabila disadari bahwa komunikasinya kurang atau tidak berhasil.

* + - * 1. Proses Komunikasi dengan Media

Sedangkan berdasarkan Paradigma Laswell, proses komunikasi dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu proses komunikasi secara primer dan proses komunikasi secara sekunder (Mukarom, 2015:77-78).

* + - * 1. Proses Komunikasi Secara Primer

Proses komunikasi secara primer adalah proses penyampaian pikiran dan/atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang (simbol) sebagai media. Lambang sebagai media partner dalam proses komunikasi adalah pesan verbal (bahasa) dan pesan non verbal (kial/gesture, isyarat, gambar, warna, dan sebagainya) yang secara langsung mampu menerjemahkan pikiran dan perasaan komunikator pada komunikan.

* + - * 1. Proses Komunikasi Sekunder

Proses komunikasi secara sekunder adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator pada komunikan dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah menggunakan lambang sebagai media pertama. Seorang komunikator menggunakan media kedua dalam menyampaikan komunikasi karena komunikan sebagai sasaran berada di tempat yang relatif jauh atau jumlahnya banyak. Surat, teleepon, teleks, surat kabar, majalah, rdio, televisi, film dan sebagainya adala media kedua yang sering digunakan dalam komunikasi. Proses komunikasi secara sekunder menggunakan media yang dapat diklarifikasikan sebagai media massa (surat kabar, televisi, radio, dan sebagainya) dan media nirmassa (telepon, surat, megapon dan sebagainya).

1. Peranan Komunikasi

Menurut Thoha (2003:10) peranan komunikasi merupakan perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai status atau kedudukan tertentu. Peranan tersebut adalah peranan individu, bagaimana seorang individu menjalankan fungsinya sebagai seorang makhluk sosial yang berhubungan dengan individu lain, atau dalam kehidupan antara atasan dan bawahan. Peranan kelompok adalah kerjasama dua orang atau lebih dalam menjalankan peranannya sebagai seorang pemberi harapan orang lain. Adapun peranan komunikasi diantaranya adalah sebagai berikut:

* + - * 1. Komunikasi itu merupakan alat suatu organisasi sehingga seluruh kegiatan organisasi itu dapat diorganisasikan (dipersatukan) untuk mencapai tujuan tertentu.
        2. Komunikasi merupakan alat untuk mengubah perilaku para anggota dalam suatu organisasi.
        3. Komunikasi adalah alat agar informasi dapat disampaikan kepada seluruh anggota organisasi (Widjaja, 2003:66).

**II.2.5. Kepala Desa**

Pengertian Kepala Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Kepala desa adalah alat pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintah desa dan berkedudukan sejajar dengan Badan Permusyawaratan Desa. Kepala desa dapat diberhentikan atas usul pimpinan BPD kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD. Kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik (namun boleh menjadi anggota partai politik), merangkap jabatan sebagai Ketua atau Anggita BPC, dan lembaga kemasyarakatan, merangkap jabatan sebagai anggota DPRD, terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah.

Sedangkan menurut Soemarno dan Dardjosumardjono (2017:66-77) Kepala Desa adalah orang pertama yang mengemban tugas dan kewajiban yang berat, yaitu menyelenggarakan dan penanggungjawab yang utama di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam urusan pemerintahan desa, urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan, ketentraman dan ketertiban sesuai perundang-undangan yang berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong-royong sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan desa.

Berdasarkan pengertian Kepala Desa di atas maka dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sangat berat dalam mengemban tugas dan kewajibannya dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang ada di desa. Disamping itu Kepala Desa diharapkan mampu memberikan dan pengarahan bagi masyarakat desanya.

Tugas Kepala Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang Kepala Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 perubahan kedua atas undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, wewenang Kepala Desa antara lain sebagai berikut:

Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa kepada bupati/wali kota;

Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa;

Menetapkan Peraturan Desa;

Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

Membina kehidupan masyarakat desa;

Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;

Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;

Mengembangkan sumber pendapatan desa;

Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;

Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;

Memanfaatkan teknologi tepat guna;

Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;

Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak dan Kewajiban Kepala Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 hak dan kewajiban Kepala Desa antara lain sbegai berikut:

Hak Kepala Desa

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa berhak:

1. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
2. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
3. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan;
4. Mendapatkan tunjangan purna tugas satu kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah;
5. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
6. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.

Kewajiban Kepala Desa

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa berkewajiban:

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal lka;
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
3. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
4. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
5. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
6. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
7. Mengundurkan diri sebagai Kepala Desa apabila mencalonkan diri sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat, kepala daerah, atau jabatan politik lain sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan yang dinyatakan secara tertulis dan tidak dapat ditarik kembali;
8. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
9. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
10. Mengelola Keuangan Desa dan Aset Desa;
11. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
12. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
13. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
14. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
15. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
16. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
17. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 pasal 27 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, Kepala Desa wajib:

1. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada masyarakat desa setempat setiap akhir tahun anggaran;
2. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan dalam forum Musyawarah Desa;
3. Memberikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara horizontal dalam bentuk lisan dan tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran;
4. Menjadi pengayom semua golongan masyarakat;
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran secara vertikal kepada bupati/wali kota; dan
6. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/wali kota.

**II.2.6. Pemberdayaan Masyarakat**

Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah proses atau upaya untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, sumber daya, dan kekuatan kepada masyarakat agar mereka dapat mengambil peranan aktif dalam mengindentifikasi dan menyelesaikan masalah dengan pendamping yang esensi masalah kebutuhan prioritas desa.

Menurut Untung (2014:63) pemberdayaan masyarakat adalah serangkaian kegiatan untuk meningkatkan aset dan kemampuan masyarakat miskin agar mau dan mampu mengakses berbagai sumber daya, pemodalan, teknologi dan pasar dengan pendekatan pendampingan, peningkatan kapasistas pelayanan serta pembelajaran menuju kemandirian.

Zubaedi (2013:75-79) mengemukakan pemberdayaan masyarakat merupakan upaya membangun kemampuan masyarakat dan memberdayakan sumber daya manusia yang ada melalui pengembangan kelembagaan, sarana dan prasarana serta pengembangan yang terdiri dari pendampingan, penyuluhanm dan pelayanan. Pendampingan yang dapat menggerakkan partisipasi total masyarakat, penyuluhan dapat merespons dan memantau ubahan-ubahan yang terjadi di masyarakat, dan pelayanan yang berfungsi sebagai unsut pengendali ketepatan distribusi asset sumber daya fisik dan nonfisik yang diperlukan masyarakat.

Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk mengangkat kemandirian dan peningkatan kapasitas dalam berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, pendidikan, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan, selain itu juga untuk mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan kesejahteraan, dan meciptakan lingkungan yang adil dan berkelanjutan.

Tujuan pemberdayaan masyarakat menurut Sumaryadi (Karimah dkk: (2014) adalah sebagai berikut :

Membantu mengembangkan manusiawi yang otentik dan integral dari masyarakat lemah, rentan, miskin, marijinal dan kaum kecil.

Memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosio ekonomi sehingga mereka lebih mandiri serta dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat.

TahapanPemberdayaan Masyarakat

Wulandari (2014:16-17) tahapan-tahapan pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:

Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.

Tahap pertama atau tahap penyadaran dan pembentukan perilaku merupakan tahap persiapan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Pada tahap ini pihak pemberdaya/actor/pelaku pemberdaya berusaha menciptakan prakodisi, supaya dapat memfasilitasiberlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif. Apa yang diintervensi dalam masyarakat sesungguhnya lebih pada kemampuan afektifnya untuk mencapai kesadaran konatif yang diharapkan. Sentuhan penyadaran akan lebih membuka keinginan dan kesadaran masyarakat akan kondisinya saat itu, dan dengan demikian akan dapat merangsang kesadaran mereka tentang perlunya memperbaiki kondisi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.

Tahap kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan ketrampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.

Tahap kedua yaitu proses tranformsi pengetahuan dan kecakapan dan keterampilan dapat berlangsung baik, penuh semangat dan berjalan efektif, jika tahap pertama telah terkondisi, masyarakat akan menjalani proses belajar tentang pengetahuan dan kecakapan yang memiliki relevansi dengan apa yang menjadi tuntutan kebutuhan tersebut. Keadaan ini akan menstimulasi terjadinya keterbukaan wawasan dan menguasai kecakapan darsar yang mereka butuhkan. Pada tahap ini masyarakat hanya dapat memberikan peran partisipasi pada tingkat yang rendah, yaitu sekedar menjadi pengikut atau objek pembangunan saja, belum mampu menjadi subjek dalam pembangunan.

Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan (keterampilan) sehingga terbentuk inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan kemandirian.

Tahap ketiga adalah tahap pengayaan atau peningkatan dan intelektualitas dan kecakapan yang diperlukan, supaya mereka dapat membentuk kemampuan kemandirian. Kemandirian tersebut akan ditandai oleh kemampuan masyarkat dalam membentuk inisiatif, melahirkan kreasi-kreasi dan melakukan inovasi-inovasi di dalam lingkungannya. Apabila masyarakat telah mencapai tahap ketiga ini maka masyarakat dapat secara mandiri melakukan pembangunan. Dalam konsep pembangunan masyarakat dalam kondisi seperti ini sering kali didudukkan sebagai subjek pembangunan atau peranan utama. Pemerintah hanya menjadi fasilitatornya saja.

Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Elliot dalam Sumaryadi (Karimah, dkk:2014) ada tiga strategi pendekatan yang dipakai dalam proses pemberdayaan masyarakat, antara lain:

*The walfare approach* yaitu membantu memberikan bantuan kepada kelompok-kelompok tertentu, misalnya mereka yang terkena musibah bencana alam dan pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk memberdayakan rakyat dalam menghadapi proses politik dan kemiskinan rakyat.

*The development approach* yaitu pendeketan ini memusatkan perhatian pada pembangunan peningkatan kemandirian, kemampuan, dan keswadayaan masyarakat.

*The empowerment approach* yaitu pendekatan yang melihat kemiskinan sebagai akibat proses politik dan berusaha memberdayakan atau melatih rakyat untuk mengatasi ketidakberdayaannya.

## II.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan dua variabel atau lebih (Haryoko dalam Sugiyono, 2016:60). Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Dengan demikian kerangka berfikir merupakan pemahaman yang bersifat mendasar sebagai landasan atas pemahaman-pemahaman lainnya, sebagai salah satu proses dalam penelitian yang akan dilakukan.

Kerangka pemikiran teoritis yang akan dikembangkan dalam penelitian ini berdasarkan dengan apa yang telah diuraikan dalam tinjauan pustaka di atas. Maka kerangka pemikiran teoritis tersebut sebagai berikut

Pemberdayaan Masyarakat

(Y)

Peran Komunikasi Kepala Desa

(X)

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

## II.4. Definisi Konsepsional dan Definisi Operasional

II.4.1. Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional adalah suatu yang menggambarkan adanya hubungan antara konsep yang khusus dengan konsep yang akan diteliti. Konsepsional juga digunakan untuk mendefinisikan pengertian di dalam penelitian, agar tidak mengalami pembiasan dalam pengumpulan data hingga pada tahap analisis penelitian (Sirangimbun dan Effendi, 2009).

Variabel menurut Arikunto (2006:118), variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian. Variabel dibagi menjadi dua, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Adapun variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut.

Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono 2016:39). Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah serangkaian kegiatan untuk meningkatkan aset dan kemampuan masyarakat miskin agar mau dan mampu mengakses berbagai sumber daya, pemodalan, teknologi dan pasar dengan pendekatan pendampingan, peningkatan kapasistas pelayanan serta pembelajaran menuju kemandirian (Untung, 2014:63).

Variabel Independen (X)

Variabel independen dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Menurut (Sugiyono 2016:39) variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang sedang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel independen yang akan diuji dalam penelitian ini adalah peran komunikasi. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain dengan tujuan untuk mempengaruhi pengetahuan dan perilaku seseorang. Peran komunikasi sebagai fungsi informasi, sosialisasi, motivasi, perdebatan dan diskusi, pendidikan, kebudayaan, hiburan, dan integrasi (Canggara, 2015:25).

II.4.2. Definisi Operasional

Definisi operasional mendefinisikan variabel secara operasional berdasarkan karakteristik yang diamati, memungkinkan peneliti untuk melakukan observasi atau pengukuran secara cermat terhadap suatu obyek atau fenomena. Ditentukan berdasarkan parameter yang dijadikan ukuran dalam penelitian. Sedangkan cara pengukuran merupakan cara dimana variabel dapat diukur dan ditentukan karakteristiknya (Hidayat, 2011).

Berikut ini adalah definisi operasional dalam penelitian ini.

Tabel 3. Definisi Operasional Penelitian

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Variabel | Dimensi | Indikator | Pernyataan | Skala |
| Peran Komunikasi (X) | Komunikator  Pesan  Media  Komunikan  Umpan balik | * Penyampaian pesan * Daya tanggap pimpinan * Daya empati * Katalisator * Kejelasan pesan * Kesesuaian dengan situasi dan kondisi * Manfaat perubahan * Saluran interpersonal * Forum pertemuan * Intensitas pertemuan * Pemanfaatan jaringan * Pemanfaatan media massa * Daya respon * Kemampuan berubah * Jalinan hubungan * Dukungan lingkungan * Suasana dialogis * Keterbukaan * Tindaklanjut | 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15, 16  17  18  19  20 | Ordinal |
| Pemberdayaan Masyarakat (Y) | Sosial  Politis  Ekonomis  Psikologis | * Akses informasi * Kemudahan pelayanan * Keswadayaan * Pemeliharaan gotong-royong * Kerjasama sinergis * Kemampuan bargaining * Pemanfaatan wewenang * Peran aktif * Pemihakan * Pemanfaatan bantuan * Realisasi bantuan * Kelancaran berusaha * Kemampuan daya beli * Sikap terhadap perubaham * Tanggungjawab * Kemandirian * Keyakinan | 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17, 18 | Ordinal |

Sumber: Data Diolah, 2024

## II.5. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik (Sugiyono, 2016:64). Berdasarkan pada permasalahan yang telah diuraikan terdahulu, maka dapat dikemukakan hipotesis sebagai jawaban sementara dalam penelitian ini, yaitu:

Berdasarkan rumusan masalah dan tinjauan teoritis maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut.

Ha : Diduga peran komunikasi Kepala Desa berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal.

Ho : Diduga peran komunikasi Kepala Desa tidak berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal.

# BAB III

# METODE PENELITIAN

## III.1. Jenis dan Tipe Penelitian

**III.1.1. Jenis Penelitian**

Menurut Sugiyono dalam bukunya “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D” (2016:4), jenis-jenis metode penelitian dapat dibedakan berdasarkan tujuan, dan tingkat ke alamiahan. Berdasarkan tujuannya ada tiga jenis penelitian, yaitu :

1. Penelitian Dasar (*Basic Research*)

Penelitian dasar bertujuan untuk mengembangkan teori dan tidak memperhatikan kegunaan yang langsung bersifat praktis. Biasanya dilakukan pada laborat yang ketat pengawasannya.

1. Penelitian Terapan (*Applied Research*)

Penelitian bertujuan untuk menerapkan, menguji, dan mengevaluasi kemampuan suatu teori yang diterapkan dalam memecahkan masalah-masalah praktis.

1. Penelitian Pengembangan (*R&D*)

Penelitian pengembangan merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengembangkan atau memvalidasi produk-produk yang digunakan dalam pendidikan dan pembelajaran. Berdasarkan tingkat kealamiahan tempat penelitian, dibedakan tiga jenis metode penelitian yaitu:

1. Penelitian Eksperimen

Penelitian eksperimen merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu. Misalnya pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai.

1. Penelitian Survey

Metode ini digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah, tetapi peneliti memberikan perlakuan dalam pengumpulan data. Misalnya seperti mengedarkan kuesioner, *test*, wawancara, dan lain-lain.

1. Penelitian Naturalistik/Kualitatif

Metode penelitian ini digunakan untuk meneliti pada tempat yang alamiah, dan penelitian tidak menbuat perlakuan, karena peneliti dalam pengumpulan data bersifat *emic*, yaitu bedasarkan pandangan dari sumber data, bukan pandangan peneliti.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis metode penelitian R&D jenis survey karena penulis ingin mencari tahu pengaruh dari peran komunikasi Kepala Desa terhadap pemberdayaan masyarakat desa.

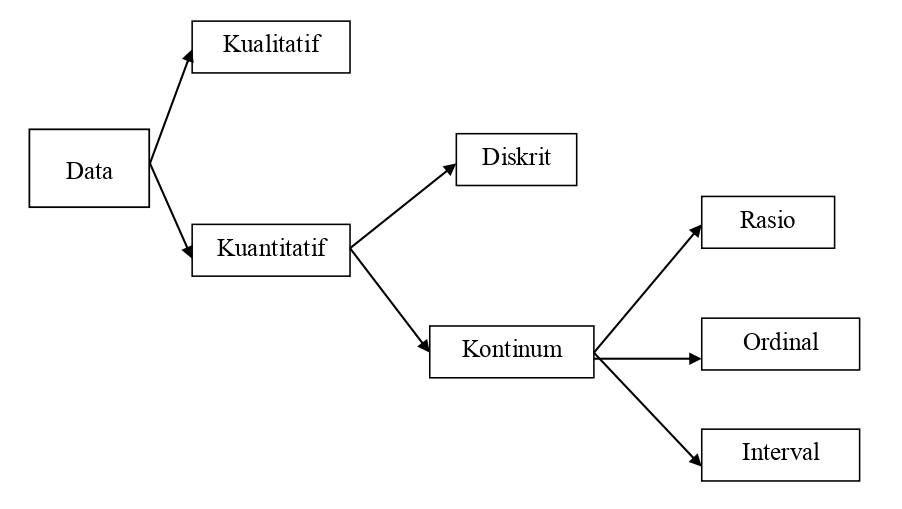
**III.1.2. Tipe Penelitian**

Menurut Sugiyono dalam buku “Metode Penelitian Administrasi” (2013:11-12) mengatakan bahwa penelitian dapat dilihat dari tingkat eksplanasi yaitu penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Berdasarkan hal ini penelitian dapat dikelompokkan menjadi: penelitian deskriptif, penelitian komparatif, dan penelitian asosiatif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif dimaksudkan guna mencari pengaruh peran komunikasi Kepala Desa terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal.

## III.2. Jenis dan Sumber Data

**III.2.1. Jenis Data**

Data merupakan sesuatu yang dikumpulkan oleh peneliti berupa fakta empiris yang digunakan untuk memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. Adapun wujud data dapat berbentuk sebagai angka, huruf, gambar, suara, suatu keadaan, atau simbol simbol lainnya. Data belum dapat bermakna bagi penerimanya kecuali telah melalui suatu pengolahan sehingga menjadi sebuah informasi yang kemudian dapat dimengerti. Adapun pembagian data dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.



Sumber: Sugiyono (2013:14)

Gambar 2. Jenis Data

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa jenis-jenis data ada dua yaitu data kualitatif dan data kuantitatif*.* Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka, atau data kualitatif yang diangkakan (Sugiyono, 2016:23).

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan peneliti adalah data kuantitaif.

**III.2.2. Sumber Data**

Menurut Sugiyono (2013:156) sumber data dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data atau peneliti. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner penelitian.

1. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data atau, misalnya lewat orang lain atau melalui dokumen, foto, dan lainnya. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian adalah data-data yang berkaitan dengan profil Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal.

## III.3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan sesuatu yang sangat penting dalam penelitian, data yang telah diperoleh akan menjadi bahan untuk mendukung terlaksananya proses penelitian. Proses ini dengan mengupulkan informasi atau data dari sumber-sumber yang relavan dan dapat dipercaya (Riduwan, 2018;19). Metode dalam pengumpulan data penelitian ini sebagai berikut:

**III.3.1. Wawancara**

Wawancara dilakukan dengan Kepala Desa Jatilawang tujuanya untuk mendapatkan informasi tentang profil Desa Jatilawang dan kondisi terkini.

**III.3.2 Dokumentasi**

Peneliti mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dengan cara mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, seperti buku, jurnal, surat kabar dan lain sebagainya untuk mendapatkan data kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dokumentasi juga berupa foto, vidio, dan catatan suara sehingga mendapatkan informasi yang rinci dan sistematis.

**III.3.3. Observasi**

Pengamatan secara lansung yang dilakaukan peneliti di lokasi penelitian dengan objek, dan kejadian untuk mengumpulkan data-data dan informasi yang akurat dan relevan, sehingga dapat dicocokkan antara hasil wawancara atau informasi dari subjek penelitian secara langsung yang digunakan untuk mendapatkan data tentang peranan komunikasi kepala desa dalam membenahi pemberdayaan masyarakat di Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal.

**III.3.4. Kuesioner (Angket)**

Menurut Sugiyono (2016:142) kuesioner merupakan teknik pengumpulan yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Pada penelitian ini peneliti memberikan daftar pertanyaan tertutup kepada responden. Pertanyaan yang sifatnya tertutup menggunakan skala *likert* dengan skor 1-5. Jawaban untuk setiap instrumen skala *likert* mempunyai gradasi dari negatif sampai positif dan untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban tersebut diberi skor sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 4. Skala Pengukuran Likert

|  |  |
| --- | --- |
| **Pilihan Jawaban** | **Skor** |
| Sangat tidak setuju | 1 |
| Tidak Setuju | 2 |
| Netral | 3 |
| Setuju | 4 |
| Sangat setuju | 5 |

Sumber: Sugiyono, 2016

## III.4. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2016:147) analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden. metabulasi dan berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Untuk peneliti yang tidak merumuskan hipotesis, langkah terakhir tidak dilakukan.

**III.4.1. Tranformasi Data**

Data dalam penelitian dapat dikategorikan sebagai data ordinal. Sedangkan analisis regresi hanya lazim digunakan bila skala pengukuran yang dilakukan adalah data interval. Oleh karena itu, jika hanya mempunyai data berskala ordinal, maka data tersebut harus diubah kedalam bentuk interval untuk memenuhi persyaratan prosedur-prosedur tersebut. Metode suksesive interval merupakan proses mengubah data ordinal menjadi data interval. Mengapa data ordinal harus diubah dalam bentuk interval.

Menstranformasikan data ordinal menjadi data interval gunanya untuk memenuhi sebagai dari syariat analisis parametrik yang mana data setidaknya beskala interval. Teknik transformasi yang paling sederhana dengan menggunakan MSI (*Methode of Successive Interval*). Langkah-langkah transformasi data (Ridwan & Kuncoro, 2018:30) sebagai berikut:

1. Perhatikan setiap butir jawaban responden dari angket yang dibagikan.
2. Setiap butir ditentukan berapa orang yang mendapat 1, 2, 3, 4, dan 5 yang disebut sebagai frekuensi;
3. Setiap frekuensi dibagi dengan banyaknya responden dan hasilnya disebut proporsi;
4. Tentukan nilai proporsi kumulatif dengan jalan menjumlahkan nilai proporsi secara berurutan perkolom skor;
5. Gunakan tabel distribusi normal, hitung nilai Z ntuk setiap proporsi kumultif yang diperoleh;
6. Tentukan nilai tinggi desitas untuk setiap nilai Z yang diperoleh (dengan menggunakan tabel tinggi densitas);
7. Tentukan nilai skala dengan menggunkan rumus:

(*Density at Lower Limit*) – (*Density at Upper Limit*)

(*Area Below Upper Limit*) – (*Area Below Lower Limit*)

*NS* =

Keterangan:

1. *Density at Lower Limit* = kepadatan batas bawah
2. *Density at Upper Limit* = kepadatan batas atas
3. *Area Below Upper Limit* = daerah dibawah batas atas
4. *Area Below Lower Limit* = daerah dibawah batas bawah
5. Tentukan nilai transformasi dengan rumus:Y = NS + [1+|NS*min* |]

**III.4.2. Pengujian Instrumen Penelitian**

Pada penelitian ini peneliti menggunakan instrumen penelitian berupa angket atau kuesioner untuk mengumpulkan data primer dan sebelum kuesioner digunakan sebagai pengumpulan data diuji dulu validitas dan reliabelitasnya.

* 1. Uji Validitas

Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Mengukur validitas dengan membuat korelasi antara skor butir pernyataan dengan total skor konstruk atau variabel. Untuk menguji validitas instrumen penelitian digunakan Teknik korelasi *product moment* yang dirumuskan sebagai berikut:

rxy =

Keterangan

Rxy = koefisien korelasi *product moment*

N = Jumlah seluruh responden

∑xy = Jumlah perkalian antara variabel x dan y

∑x2 = Jumlah dari kuadrat nilai variabel x

∑y2 = Jumlah dari kuadrat nilai variabel y

(∑x)2= Jumlah nilai x kemudian dikuadratkan

(∑y)2 = Jumlah nilai y kemudian dikuadratkan

Apabila rhitung memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan rtabel serta memiliki nilai positif, artinya pernyataan kuesioner dianggap valid (Ghozali, 2018:18), kemudian membandingkan nilai dari rhitung dan nilai rtabel dengan *degree of freedom* (df = n-2).

Sampel penelitian ini yaitu 30 responden. Sehingga nilai df bisa didapat dengan 100 – 2 = 98. berdasarkan tingkat signifikansi atau alpha 0,05 maka didapat nilai r tabel adalah 0,196. Dalam mengambil keputusan valid atau tidaknya menggunakan kaidah di bawah ini:

* + - * 1. Apabila rhitung > rtabel, butir pernyataan dapat dinyatakan valid.
        2. Apabila rhitung < rtabel, butir pernyataan tidak dapat dinyatakan valid.
  1. Uji Reliabilitas

Reliabilitas pada dasarnya adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Jika hasil pengukuran yang dilakukan secara berulang relatif sama maka pengukuran tersebut dianggap memiliki tingkat reliabilitas yang baik.

Untuk mengukur uji reliablitas menggunakan rumus *Cronbach’s Alpha* sebagai berikut.

r11 =

Keterangan:

r11 = Reliabilitas Instrumen

∑ab2 = Jumlah Varian Butir

k = Jumlah Pernyataan

= Varian Total

Pengujian reliabilitas dengan Cronbach alpha dapat dilihat dari nilai alpha, nilai dari 0,00 sampai dengan 1,00 jika skala itu dikelompokan ke dalam lima kelas dengan *range* yang sama, maka ukuran kemampuan alpha dapat di interpretasikan sebagai berikut:

* + - * 1. Nilai *Cronbach alpha* 0,00 s.d 0,20 berarti kurang reliabel
        2. Nilai *Cronbach alpha* 0,21 s.d 0,20 berarti agak reliabel
        3. Nilai *Cronbach alpha* 0,41 s.d 0,60 berarti cukup reliabel
  1. Nilai *Cronbach alpha* 0,61 s.d 0,80 berarti reliabel
  2. Nilai *Cronbach alpha* 0,81 s.d 1,00 berarti sangat reliabel

Kriteria yang digunakan dalam keputusann uji reliabilitas yaitu:

Jika r11 > 0,60 maka instrument bersifat reliabel

Jika r11 ≤ 0,60 maka instrument bersifat tidak reliabel

**III.4.3. Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heteroksidasitas, dan uji autokorelasi. Uji asumsi klasik digunakan untuk menguji data yang dikumpulkan layak atau tidak untuk kemudian: dianalisis.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel dependent (terikat) dan variabel independen (bebas) memiliki distribusi normal atau tidak. Suliyanto (2012:69) menyatakan pengujian normalitas menggunakan pendekatan grafik yaitu menggunakan *Normal Probability Plot*, yaitu dengan membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan menggunakan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Menggunakan analisis grafik adalah metode yang termudah baik dengan menggunakan Histogram maupun *Normal Probability Plot*.

1. Uji Multikolonieritas

Suliyanto (2012;90) uji multikoliniearitas dapat dilakukan dengan melihat nilai TOL *(Tolerance)* dan *Varian Inflantion Factors* dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel berikutnya. Jika VIF tidak lebih dari 100, maka model dinyatakan tidak terdapat gejala multokolinear. Uji multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi menemukan korelasi antara variabel independen. Model regresi yang baik sebenarnya tidak memiliki korelasi antar variabel bebas. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *Varians Inflation Factor* (VIF) serta TOL *(tolerance).* Model regresi independen multikolinieritas adalah yang memiliki nilai VIF < 10 dan nilai toleransi > 0,1. Jika nilai VIF > 10 dan nilai toleransi < 0,1, maka terjadi gejala multikolinearitas.

1. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasii yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Model regresi yang baik yaitu regresi yang bebas dari autokorelasi (Ghozali, 2016:107).

Salah satu cara yang digunakan dalam uji autokorelasi yaitu uji Durbin-Watson (DW). Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi melalui kriteria DW tabel dengan tingkat signifikansi 5% yaitu sebagai berikut:

1. Ada autokorelasi positif bila nilai DW lebih kecil daripada dL maka koefisien autokorelasi lebih besar daripada nol.
2. Tidak ada autokorelasi bila nilai DW berada di antara du sampai dengan 4 – du maka koefisien autokorelasi sama dengan nol.
3. Bila nilai DW terletak diantara dL dan du, maka tidak dapat disimpulkan.
4. Koefisien autokorelasi lebih besar daripada nol bila nilai DW lebih besar daripada 4 – dL, artinya ada autokorelasi negatif.

Bila nilai DW terletak diantara 4 – du dan 4 – dL, maka tidak dapat disimpulkan.

1. Uji Heterokedastisitas

Suliyanto (2012;95) menyatakan heterokedastisitas yaitu terdapat varian variabel dalam model regresi yang tidak sama (konstan). Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terdapat ketidaksamaan varians residual dari suatu pengamatan lain. Pada saat mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas, dapat ditentukan dengan melihat grafik plot (scatterplot) antara lain prediksi variabel dependen (ZPRED) dengan residual (SRESID), jika grafik plot menunjukkan pola titik bergelombang atau melebar lalu menyempit, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi heteroskedastisitas. Namun, jika tidak ada pola yang jelas, titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

**III.4.4. Analisis Regresi Linier Sederhana**

Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui bagaimana variabel dependen dapat diprediksikan melalui variabel independen secara individual. Regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen (Sugiyono, 2012:270).

Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier sederhana digunakan untuk menguji hipotesis 1 dan hipotesis 2. Tujuannya yaitu untuk memprediksi dan mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen yang terdiri dari peran komunikasi terhadap variabel dependen, yaitu pemberdayaan masyarakat.

Persamaan umum regresi linier sederhana adalah sebagai berikut.

Y = α + βX + e

Keterangan:

Y = Subyek dalam variabel dependen yang diprediksi

α = Harga Y bila X = 0 (harga konstan)

β = Angka arah atau koefisien regresi yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada variabel independen. Bila β ( + ) maka naik, dan bila ( - ) maka terjadi penurunan.

**III.4.5. Uji Koefisien Determinasi**

Uji koefisien determinasi adalah suatu uji yang penting dalam penelitian kuantitatif. Uji ini untuk mencari seberapa besar pengaruhnya variabel x terhadap variabel y setelah diketahui bahwa adanya pengaruh melalui uji signifikan. Rumus yang digunakan dalam uji koefisien determinasi ini (Riduwan, 2015:228) adalah sebagai berikut:

KD = r2 x 100%

Keterangan:

KD = Koefisien determinasi

r2 = koefisien korelasi

## III.5. Sistematika Penulisan

Sistematika adalah caea atau aturan yang digunakan untuk menyusun teks atau naskah agar mudah dipahami oleh pembaca. Untuk mempermudah pembahasan penelitian ini, maka peneliti membuat simtematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian yang bersifat akademis maupun praktis.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini peneliti membahas mengenai penelitian terdahulu yang menjadi sumber-sumber dan referensi yang relevan. Selain itu juga terdapat kerangka teori yang membahas mengenai definisi konsepsional, pokok penelitian, dan alur pikir penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bagian ini peneliti memaparkan berbagai jenis metode yang akan digunakan peneliti, untuk menyelesaikan penelitian. Di dalamnya terdapat jenis dan tipe penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta sistematika penulisan.

BAB IV : DESKRIPSI OBYEK

Pada sub bagian ini peneliti akan memaparkan berbagai hal terkait subjek dan objek penelitian, yang ditentukan tentunya sudah melalui observasi oleh peneliti.

BAB V : HASIL PENELITIAN

Pada bagian ini peneliti akan mulai mengumpulkan berbagai data yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian ini. Selain itu, peneliti juga akan mulai menganalisis dan menyusun data sesuai dengan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian ini.

BAB VI : PEMBAHASAN

Pada bagian ini peneliti akan mulai membahas terkait data-data yang sudah peneliti peroleh serta mulai menentukan hasil dari penelitian yang peneliti lakukan. Sub bagian ini merupakan sub terakhir sebelum memasuki bagian penutup dan penarikan kesimpulan.

BAB VII : PENUTUP

Di bagian penutup, peneliti akan memberikan penyelesaian atas masalah yang ada dalam penelitin ini serta memberikan dan menarik kesimpulan juga saran terkait topik yang ada dalam penelitian ini.

# BAB IV

# DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

## IV.1. Sejarah Desa

Sebuah sejarah baik suatu negara, kota, kabupaten, desa maupun kawasan, terlihat dari jejak peninggalan-peninggalanya ataupun sering disebut cultural heritage dan living cultural yang tersisa dan hidup di kawasan tersebut. Keduanya merupakan warisan peradaban manusia itu sendiri. Demikian halnya Desa Jatilawang, wilayah yang kaya dengan jejak peninggalan sebagai penanda bahwa Desa Jatilawang Kecamatan Kramat sebagai tempat yang tidak dapat dilepaskan dari keterkaitan garis sejarah hingga membentuk kawasan desa seperti sekarang ini.

Desa Jatilawang menurut sejarah didirikan oleh beberapa tokoh yaitu Mbah Ganjur Mbah Bumi Rata, Mbah Besot dan Nyai Prawan Sunti. Awal mula beliau membuka hutan unuk pemukiman dari sebelah utara perbatasan dengan desa yang sekarang dinamakan Desa Dinuk. Kemudian, melanjutkan membabat hutan kea rah selatan yang sekarang menjadi perbatasan dengan Desa Kedokan Sayang. Beliau terus melanjutkan perjalanan membabat hutan. Lalu, beliau merasa sudah cukup melanjutkan kegiatan lainnya yaitu melakukan semedi. Kegiatan semedi yang ia lakukan sebagai rasa syukur kepada Sang Maha Pencipta atas karunia dan kelancaran usaha membuka daerah pemukiman tersebut. Seluruh upaya yang telah dilakukan oleh beliau untuk menyatukan daerah-daerah tersebut menjadi satu pun berhasil. Oleh karena itu, dinamakanlah daerah tersebut dengan nama Desa Jatilawang.

## 1V.2. Visi dan Misi

**IV.2.1. Visi Desa Jatilawang**

"Terwujudnya Desa Jatilawang yang Lebih Sejahtera, Maju dan Amanah"

Visi pembangunan desa adalah suatu gambaran yang menantang kondisi desa yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan desa yang direpresentasikan dalam sejumlah sasaran pembangunan yang dicapai melalui berbagai strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan desa dengan melihat petensi dan kebutuhan desa. Penetapan visi pembangunan desa, sebagai bagian dari perencanaan strategis pembangunan desa, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan pembangunan suatu desa mencapal kondisi yang yang diharapkan.

Visi pembangunan Desa Jatilawang tahun 2019-2025 disusun berdasarkan pada sumber utama dari visi Kepala Desa yang telah terpilih melalui proses Pemilihan Kepala Desa secara langsung yang saat ini sedang menjabat. Mengingat bahwa Kepala Desa terpilih dalam pemilihan Kepala Desa Tahun sebelumnya belum menyusun RPJMDesa, maka visi dan misi dalam RPJMDesa ini ditetapkan untuk tahun 2019-2025 yang dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Jatilawang seperti Pemerintah Desa, BPD, LPMD, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat desa pada umumnya. Surta pertimbagan kondisi ekstemal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di kecamatan. Namun demikian dapat dimungkinkan apabila Kepala Desa terpilih dalam pemilihan Kepala Desa yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2013-2019 akan merubah visi dan misi yang disesuaikan dengan visi dan misi yang bersangkutan.

Visi pembangunan desa tahun 2019-2025 ini disusun dengan memperhatikan atau mengacu pembangunan daerah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal Tahun 2019-2025 (Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2010), yakni “Terwujudnya Kabupaten Tegal yang Lebih Sejahtera, Maju dan Amanah". Maka berdasarkan pertimbangan di atas visi Desa Jatilawang tahun 2019-2025 adalah "Mewujudkan Desa Jatilawang yang Makmur dan Sejantera.

Dengan demikian, secara khusus dijabarkan makna dan visi pembangunan desa yang sangat diperlukan untuk membangun kesamaan persepsi, sikap (komitmen), dan perilaku (partisipasi) segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam setiap tahapan proses pembangunan selama lima tahun ke depan. Makmur adalah menciptakan suatu kondisi ekonomi masyarakat yang berkecukupan karena di Desa Jatilawang sebagian besar penduduknya berpenghasilan dan usaha pertanian.

Beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran tercapainya kehidupan yang agamis adalah: terciptanya suatu kebersamaan dalam kebaikan dan terciptanya ukhuwah islamiyah, terbentuknya kepedulian dan rasa sosial yang tinggi terhadap sesama, terpenuhinya masjid-masjid dan mushola sebagai tempat perbadatan dan kegiatan keagamaan, TPA-TPQ senantiasa dipenuhi siswa-siswi belajar agama. Untuk mencapai hal tersebut maka Pemerintah Desa Jatilawang mengupayakan pembangunan yang difokuskan pada hal di bawah ini:

1. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana keagamaan sepert pembangunan masjid dan mushola, pembangunan TPA/TPQ sebagai sarana anak-anak mengenal dan belajar agama lebih dini.
2. Pemanfaatan dan pengelolaan masjid sebagai tempat diskusi agama dan pendalaman imu agama.

Konsep sejahtera menunjukkan kondisi kemakmuran suatu masyarakat, yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (materi) maupun sosial (spiritual), dengan kata lain kabutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir bathin secara adil dan merata dengan menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing dan berdayaguna dan meningkatan pembangunan yang difokuskan pada pembangunan perkonomian desa yang berbasis pada potensi desa yang berdaya jual dan berdaya saing.

Adapun indikator secara ilmiah adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga meningkatkan pendapatan perkapita pada tingkat yang tinggi, menurunnya tingkat pengangguran, menurunnya jumlah penduduk miskin, terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif, meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang ditandai terpenuhinya hak sosial masyarakat mencakup akses pads pelayanan dasar sehingga mampu meningkatkan Indeks pembangunan manusia (IPM), meningkatkan perlindungan dan kesejateraan sosial, keluarga kecil berkualitas, pemuda dan olah raga serta meningkatkan kualitas kehidupan beragama, meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan, tersedianya infrastruktur yang memadai, meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab yang mampu pembangunan desa mendukung.

**1V.2.2. Misi Desa Jatilawang**

1. Mewujudkan masyarakat Desa Jalawang yang religius

Misi:

* + - * 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
        2. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap agama.

1. Mewujudkan masyarakat Desa Jatilawang yang sejahtera

Misi:

1. Pembangunan
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa.
3. Meningkatkan sumber daya alam yang ada.
4. Meningkatkan peran aktif BPD, LPMD, RT/RW, dan tokoh masyarakat dalam pembangunan desa.
5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berswadaya membangun desa.
6. Pemerintahan

Menciptakan Sistem Pemerintahan yang Baik dan Demokratis.

1. Kemasyarakatan
2. Peningkatan dan pengembangan usaha kecil dan menengah.
3. Menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban dan kerukunan warga.
4. Mewujudkan keluarga sehat sejahtera melalui peran aktif TP. PKK, Posyandu dan organisasi lainnya.

## 1V.3. Geografis, Peta, dan Batas Desa

**1V.3.1. Keadaan Geografis**

Desa Jatilawang adalah salah satu desa di Kecamatan Kramat yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah dan merupakan salah satu desa yang Kecamatan Kramat dengan jarak tempuh darat ke kecamatan kurang lebih 4 km dan 21 km ke arah ibu kota Kabupaten Tegal di Slawi.

Kabupaten Tegal berada pada posisi 1060 57' 6" sampai dengan 1090 21' 30" BT dan antara 60 50 41" sampai dengan 7' 15' 30" LS, sedangkan desa Jatilawang berada pada posisi koordinat bujur 109.1986 dengan koordinat lintang -6.900625 dengan ketinggian DPL (M)³, termasuk dalam topografis daerah pantai dengan jenis tanah yang tergolong dalam tanah alluvial yaitu jenis tanah yang potensial untuk pengembangan produk pertanian (padi, palawija, hortikultura dan perkebunan).

Dilihat pada posisi geografis tersebut maka Kabupaten Tegal, struktur dan ketinggian tanah antara kecamatan yang satu dengan yang lainya masing-masing berbeda, yang terbagi dalam kelompok:

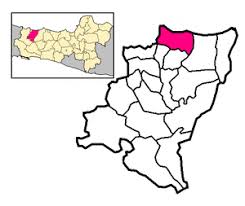
1. Wilayah Slawi dan sekitamya = 42 m dpl
2. Wilayah Lebaksiu dan sekitarnya = 135 m dpl
3. Wilayah Bumijawa dan sekitamya = 949 m dpl
4. Wilayah Kramat dan sekitarnya = 8 m dpl

Sedangkan secara topografi Desa Jatilawang berada pada dataran rendah daerah pantai, sebaga imana data topografi daerah-daerah di Kabupaten Tegal, antara lain:

Daerah pantai, meliputi Kramat, Suradadi, dan Warureja. Dataran rendah meliputi Adiwerna, Dukuhturi, Talang, Tarub, Pagerbarang, Dukuhwaru, Slawi, Lebaksiu, Suradadi, Warureja, Kramat, Kedung Banteng dan Pangkah. Dataran Tinggi, meliputi Jatinegara, Margasari, Balapulang, Bumijawa dan Bojong.

**IV.3.2. Peta**

Berikut ini adalah peta Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal.



Sumber: Desa Jatilawang, 2024

Gambar 3. Peta Desa Jatilawang

Sedangkan orbitasi dari desa berjarak:

Jarak ke ibu kota kecamatan (km).

Lama jarak tempuh ke ibukota kecamatan dengan kendaraan bermotor (Jam): 0,15.

Lama jarak tempuh ke ibukota kecamatan dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor (Jam): 0,25

Jumlah Kendaraan umum ke ibu kota kecamatan (Unit):1

1. Jarak ke ibu kota kabupaten/kota (km)

Lama jarak tempuh ke ibukota kabupaten dengan kendaraan bermotor (Jam):1

Lama jarak tempuh ke ibukota kabupaten dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor (Jam): 2

Kendaraan umum ke ibu kota kabupaten/kota (Unit): 3

1. Jarak ke ibu kota provinsi (km).

Lama jarak tempuh ke ibukota provinsi dengan kendaraan bermotor (Jam): 4

Lama jarak tempuh ke ibukota provinsi dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor (Jam):7,5

Kendaraan umum ke ibukota provinsi (Unit): 5

**IV.3.3. Batas Desa**

Adapun batas-batas Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut.

1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Dinuk Kecamatan Kramat
2. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Kemantran Kecamatan Kramat
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kedokansayang Kecamatan Tarub
4. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Mejasem Timur Kecamatan Kramat

## IV.4. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Secara umum struktur organisasi Pemerintah Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut.



Sumber: Desa Jatilawang, 2024

Gambar 4. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Jatilawang

Adapun susunan organisasi Pemerintah Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, adalah sebagai berikut:

Kepala Desa : Dakyani

Sekretaris Desa : Darono

Kasi Pemerintahan : Agus Supriyanto, S.H.

Kasi Pelayanan : Rosikin

Kasi Kesejahteraan : Afriadi Bahtiar

Kaur Tata Usaha dan Umum : Khaerudin

Kaur Keuangan : Sumarni

Kaur Perencanaan : Dwi Bagus Setiono

Kepala Pelaksana Kewilayahan (Kepala Dusun)

* + - 1. Nurul Retno Suci
      2. Tri Sutrisno

## IV.5. Demografi Penduduk

**IV.5.1. Jenis Kelamin**

Berdasarkan jenis kelamin, penduduk dikelompokkan menjadi laki-laki dan perempuan. Jumlah penduduk Desa Jatilawang diketahui sebesar 6.352 jiwa, terdiri dari 3.261 jiwa laki-laki dan 3.091 jiwa perempuan. Jumlah kepala keluarga sebanyak 1.853 KK. Untuk lebih jelas maka dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 5. Jumlah Pendduk Berdasarkan Jenis Kelamin

|  |  |
| --- | --- |
| Jenis Kelamin | Jumlah (Orang) |
| Laki-laki | 3.261 |
| Perempuan | 3.091 |
| Jumlah total | 6.352 |

Sumber: Desa Jatilawang, 2024

**IV.5.2. Kelompok Usia**

Kelompok usia menyajikan informasi mengenai distribusi usia penduduk berdasarkan kelompok kesejahteraannya. Indikator ini bertujuan untuk melihat apakah kelompok kesejahteraan tertentu didominasi oleh kelompok usia yang relatif produktif atau didominasi oleh kelompok usia non-produktif seperti anak-anak atau lanjut usia. Pembagian kelompok usia dalam buku profil ini adalah sebagai berikut.

Tabel 6. Jumlah Pendduk Berdasarkan Kelompok Usia

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Usia | Laki-laki (orang) | Perempuan (orang) |
| 0-12 bulan | 45 | 92 |
| 1-5 tahun | 231 | 468 |
| 6-10 tahun | 232 | 465 |
| 11-15 tahun | 227 | 474 |
| 16-20 tahun | 234 | 478 |
| 21-25 tahun | 228 | 462 |
| 26-30 tahun | 225 | 456 |
| 31-35 tahun | 236 | 495 |
| 36-40 tahun | 223 | 422 |
| 41-45 tahun | 240 | 229 |
| 46-50 tahun | 203 | 212 |
| 51-55 tahun | 202 | 209 |
| 56-60 tahun | 205 | 206 |
| 61-65 tahun | 120 | 110 |
| 76-70 tahun | 117 | 103 |
| 71-75 tahun | 167 | 138 |
| >70 tahun | 40 | 25 |
| Jumlah | 3261 | 3091 |

Sumber: Desa Jatilawang, 2024

**IV.5.3. Pekerjaan Warga**

Pekerjaan atau mata pencaharian adalah pekerjaan yang menjadi pokok penghidupan. Mata pencaharian diartikan pula sebagai segala aktivitas manusia dalam memberdayakan potensi sumber daya alam. Maka, data pekerjaan warga di Desa Jatilawang dapat disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 7. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pekerjaan | Laki-laki | Perempuan |
| Petani | 175 | 163 |
| Buruh tani | 180 | 159 |
| Buruh migran | 17 | 20 |
| Pegawai Negeri Sipil | 10 | 7 |
| Pengrajin Industri Rumah Tangga | 23 | 4 |
| Pedagang keliling | 19 | 8 |
| Peternak | 59 | 9 |
| Dokter swasta | 1 | - |
| Bidan swasta | - | 1 |

Sumber: Desa Jatilawang, 2024

**IV.5.4. Pendidikan Warga**

Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa pengertian pendidikan ialah tuntunan tumbuh dan berkembangnya anak. Artinya, pendidikan merupakan upaya untuk menuntun kekuatan kodrat pada diri setiap anak agar mereka mampu tumbuh dan berkembang sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat yang bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan dalam hidup mereka. Maka, data pendidikan warga di Desa Jatilawang dapat disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 8. Jumlah Pendduk Berdasarkan Pendidikan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Data Pendidikan Warga | Laki-laki | Perempuan |
| Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK | 59 | 45 |
| Usia 3-6 tahun yang sedang TK/play group | 29 | 15 |
| Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah | 30 | 39 |
| Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah | 43 | 35 |
| Usia 18-56 tahun yang tidak pernah sekolah | 40 | 45 |
| Usia 18-56 tahun tidak tamat SD | 75 | 73 |
| Usia 18-56 tahun yang tidak tamat SLTP | 56 | 69 |
| Usia 18-56 tahun yang tidak tamat SLTA | 70 | 56 |
| Tamat SD/sederajat | 69 | 75 |
| Tamat SMP/sederajat | 70 | 73 |
| Tamat SMA/sederajat | 60 | 59 |
| Tamat D1/sederajat | 10 | 13 |
| Tamat D2/sederajat | 15 | 17 |
| Tamat D3/sederajat | 25 | 20 |
| Tamat S1/sederajat | 20 | 23 |
| Tamat S2/sederajat | - | - |
| Tamat S3/sederajat | - | - |

Sumber: Desa Jatilawang, 2024

## IV.6. Lembaga Kemasyarakatan

Lembaga sosial atau dikenal juga satu jenis lembaga yang mengatur rangkaian tata cara dan prosedur dalam melakukan hubungan antar manusia saat mereka menjalani kehidupan bermasyarakat dengan tujuan mendapatkan keteraturan hidup. Maka, dapat disajikan lembaga kemasyarakatan di Desa Jatilawang dalam tabel berikut.

Tabel 9. Lembaga Kemasyarakatan

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nama Lembaga | Jumlah Lembaga | Jumlah Pengurus | Ruang Lingkup Kegiatan | Jumlah Jenis Kegiatan |
| LKMD / LKMK | - | - | - | - |
| LPMD / LPMK | 1 | 15 | Pemberdayaan Masyarakat | 4 |
| PKK | 1 | 27 | Pemberdayaan Keluarga | 12 |
| Rukun Warga | - | 5 | Pemerintahan | 2 |
| Rukun Tetangga | - | 16 | Pemerintahan | 2 |
| Karang Taruna | 1 | 10 | Kemasyarakatan | 2 |
| Kelompok Tani / Nelayan | 3 | 9 | Pertanian | 12 |
| Lembaga Adat | - | - | - | - |
| Badan Usaha Milik Desa | - | - | - | - |
| Organisasi Perempuan Lain | 6 | 18 | Keagamaan | 4 |
| Organisasi Pemuda Lainnya | 3 | 9 | Kesehatan | 1 |

Sumber: Desa Jatilawang, 2024

## IV.7. Sarana dan Prasarana

**IV.7.1. Sarana dan Prasarana Pendidikan**

Secara etimologis (Bahasa) prasarana berarti alat tidak langsung untuk mencapai tujuan dalam Pendidikan. Misalnya lokasi/tempat, bangunan sekolah, lapangan olahraga, uang dsb. Sedangkan sarana berarti alat langsung untuk mencapai tujuan Pendidikan. Misalnya; ruang, buku, perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya.

Pembangunan pendidikan bertujuan mencerdaskan masyarakat yang akan mengarah pada peningkatan kualitas sumber daya manusia serta menumbuhkan kesadaran dan sikap masyarakat untuk selalu berupaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Kondisi prasarana pendidikan di Desa Kradenan sudah memadai. Ada beberapa sekolah seperti KB/TK, TPA/TPQ, SD Negeri Jatilawang 01 dan SD Negeri Jatilawang 02. Nama TPA/TPQ yaitu MBP Al-Falah, Madrasah Mamba'ul Ulum, MDTA Hidayatul Mubtadi'ien, MDTU Akhlaqul Karimah, serta MDTU AI Hidayah. Maka, dapat disajikan sarana dan parasarana di Desa Jatilawang dalam tabel berikut.

Tabel 10. Sarana dan Prasarana Pendidikan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Jenis | Sewa (Buah) | Milik Sendiri (Buah) |
| Gedung TK | - | 2 |
| Gedung Tempat Bermain Anak | - | 2 |
| Perpustakaan desa/kelurahan | - | 4 |
| Gedung SD | - | 2 |

Sumber: Desa Jatilawang, 2024

**IV.7.2. Sarana dan Prasarana Ekonomi**

Ekonomi dan sarana prasarananya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena setiap aspek kegiatan perekonomian membutuhkan prasarana atau insfrastruktur yang merupakan satuan terbesar dan alat utama dalam berbagai kegiatan. Oleh karena prasarana (insfrastruktur) merupakan hal yang penting, pembangunan perekonomian tidak dapat berjalan lancar jika prasarana tidak baik. Maka, dapat disajikan dalam tabel berikut.

* + - 1. Lembaga Ekonomi dan Unit Usaha Desa

Tabel 11. Lembaga Ekonomi dan Unit Usaha Desa

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Jenis Lembaga Ekonomi | Jumlah /Unit | Jumlah Kegiatan | Jumlah Pengurus dan Anggota |
| Koperasi Unit Desa | 1 | 5 | 20 |
| Kelompok Simpan Pinjam | 3 | 1 | 12 |
| Jumlah | 4 | 6 | 32 |

Sumber: Desa Jatilawang, 2024

* + - 1. Industri Kecil dan Menengah

Tabel 12. Industri Kecil dan Menengah

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Jenis Industri | Jumlah /Unit | Jumlah Kegiatan | Jumlah Pengurus dan Anggota |
| Industri Makanan | 12 | 1 | 3 |
| Industri Kerajinan | 14 | 4 | 27 |
| Industri Material Bahan Bangunan | 4 | 1 | 8 |
| Rumah Makan dan Restoran | 8 | 1 | 16 |
| Jumlah | 48 | 7 | 57 |

Sumber: Desa Jatilawang, 2024

**IV.7.3. Sarana dan Prasarana Kesehatan**

Sarana Kesehatan dalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, salah satunya adalah puskesmas. Sedangkan prasarana adalah salah satu alat penunjang bagi terselenggaranya kegiatan pelayanan kesehatan di bidang kesehatan, yang terdiri dari alat transportasi dan alat-alat kesehatan. Maka, dapat disajikan dalam tabel berikut.

Prasarana Kesehatan

Tabel 13. Prasarana Kesehatan

|  |  |
| --- | --- |
| Jenis Prasarana | Jumlah (Unit) |
| Puskesmas Pembantu | 1 |
| Posyandu | 5 |
| Tempat Praktik Dokter | 1 |

Sumber: Desa Jatilawang, 2024

Tenaga Kesehatan

Tabel 14. Tenaga Kesehatan

|  |  |
| --- | --- |
| Jenis Sarana | Jumlah (orang) |
| Dokter Umum | 1 |
| Paramedis | 4 |
| Dukun Bersalin Terlatih | 1 |
| Bidan | 3 |
| Perawat | 3 |
| Dokter Praktik | 1 |

Sumber: Desa Jatilawang, 2024

* + - 1. Sarana dan Prasarana Peribadatan

Fasilitas untuk ibadah adalah tempat untuk menjalankan ibadah unat beragama sacara berjamaah untuk memenuhi kebutuhan rohani.

Tabel 15. Sarana dan Prasarana Peribadatan

|  |  |
| --- | --- |
| Jenis Prasarana | Jumlah (Buah) |
| Masjid | 3 |
| Langgar/Suaru/Mushola | 6 |

Sumber: Desa Jatilawang, 2024

1. Sarana dan Prasarana Olahraga

Sarana dan prasarana olahraga adalah sumber daya pendukung yang terdiri dari tempat olahraga dalam bentuk bangunan di atasnya dan batas fisik yang statusnya jelas dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk pelaksanaan program kegiatan olahraga.

Tabel 16. Sarana dan Prasarana Olahraga

|  |  |
| --- | --- |
| Jenis Prasarana | Jumlah (Buah) |
| Lapangan Sepak Bola | 1 |
| Lapangan Bulu Tangkis | 5 |
| Meja Pingpong | 2 |
| Lapangan Voli | 1 |
| Lapangan Basket | 1 |
| Pusat Kebugaran | 1 |

Sumber: Desa Jatilawang, 2024

## IV.8. Potensi Desa

**IV.8.1. Potensi Sumber Daya Alam**

Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang ada di dalam alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan serta kesejahteraan manusia.

* + - 1. Tanah Sawah

Sawah irigasi teknis : 137 Ha

* + - 1. Tanah Kering

Pemukiman : 23.570 Ha

Pekarangan : 11.785 Ha

* + - 1. Tanah Fasilitas Umum

Tanah Bengkok : 16.135 Ha

Kebun Desa : 1 Ha

Lapangan Olahraga : 1.333 Ha

Tempat Pemakaman Desa/Umum : 1 Ha

Tempat Pembuangan Sampah : 1 Ha

Pertokoan : 2 Ha

**IV.8.2. Potensi Desa Aspek Budaya dan Kesenian**

Budaya adalah cara kehidupan yang mencakup pengetahuan, sikap, pola perilaku, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat dan kebiasaan-kebiasaan yang dimiliki dan diwariskan oleh anggota suatu masyarakat tertentu sebagai bukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran hidup guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang bersifat tertib dan damai.

Kesenian adalah bagian dari budaya dan merupakan sarana yang digunakan untuk mengekspresikan rasa keindahan dari dalam jiwa manusia. Selain mengekspresikan rasa keindahan dari dalam jiwa manusia, kesenian juga mempunyai fungsi lain.

Kuda Lumping

Kuda lumping adalah seni tari yang dimainkan dengan properti berupa kuda tiruan, yang terbuat dari anyaman bambu atau bahan lainnya dengan dihiasi rambut tiruan dari tali plastik atau sejenisnya yang di gelung atau di kepang, sehingga pada masyarakat jawa sering disebut sebagai jaran kepang.

Kuliner

Potensi bisnis kuliner ada di semua tempat kegiatan ekonomi berlangsung, mulai dari pasar tradisional hingga restoran modern. Barang dagangan yang dijual bervariasi, seperti makanan ringan hingga makanan berat. Potensi kuliner di Desa Jatilawang terdapat olahan kerupuk khas yaitu Kerupuk Jatilawang. Lalu, ada pengolahan ikan asap dan pembuatan mirrong udang.

Kerajinan.

Kerajinan adalah salah satu hal yang sering dilakukan oleh seseorang. Kerajinan juga akan membuahkan sebuah hasil atau benda. Benda-benda tersebut tentu memiliki nilai-nilai tertentu. Saat ini, hal- hal yang menyangkut kerajinan sangat banyak diluar sana. Tidak hanya sebagai pengisi waktu luang, bahan kerajinan dapat dijadikan ladang bisnis. Kerajinan merupakan bagian dari seni rupa terapan yang produksinya melibatkan keterampilan manual dalam membuat benda- benda kebutuhan hidup.

Produksi kerajinan dirancang untuk tujuan fungsional (kegunaan) sekaligus memiliki nilai keindahan. Potensi hasil kerajinan dari desa ialah pembuatan tas ayam dari bambu. Akan tetapi, pembuatan tas ini mulai ditinggalkan oleh masyarakat karena tidak diwariskan oleh generasi yang berikutnya.

## IV.9. Kondisi Terkini

Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal saat ini masih berproses dalam membangun desa seperti desa-desa yang lainnya yang ada di Indonesia. Status desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2024 Desa Jatilawang termasuk dalam kategori berkembang dengan skor 0,6651. Adapun total skor tersebut terdiri dari Indeks Ketahanan Sosial (IKS) sebesar 0,8286, Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) sebesar 0,5, dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) sebesar 0,6667. Desa Jatilawang sudah melaksanakan pelaporan realisasi anggaran semester 1 tahun 2024 kepada masyarakat melalui mudes. Desa Jatilawang juga sudah membentuk Tim RPJMDesa untuk penambahan masa jabatan Kepala Desa periode 2026-2027 dan Tim RKPDesa tahun 2025.